

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN  
KERAMBA JARING APUNG DI DANAU MANINJAU OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**OLEH :**

**YUNI ASHARA**  
**NPM : 197110490**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2023**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Yuni Ashara  
NPM : 197110490  
Program Studi : Administrasi Publik (S.1)  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Format Sistematika dan Pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena dinilai layak serta dapat di setujui untuk disidangkan.

Pekanbaru, 02 November 2023

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

  
**Lilis Suriani, S.Sos., M.Si**  


Pembimbing,

  
**Lilis Suriani, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Yuni Ashara  
Npm : 197110490  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 02 November 2023

Ketua

  
**Lilis Suriani, S.Sos., M.Si**

Sekretaris

  
**Eko Handrian, S.Sos.,M.Si**

Anggota,

  
**Kartius, S.Sos., M.AP**



**KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 924/UIR-FS/KPTS/2023**

**TENTANG**

**TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- : a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
- b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
- 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN :**

- : KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

- 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : Yuni Ashara  |
| N P M              | : 197110490  |
| Program Studi      | : Administrasi Publik  |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1)  |
| Judul Skripsi      | : Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Sumatera Barat Provinsi |

Struktur Tim :

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si  | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Kartius, S.Sos., M.AP       | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |

- 2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
- 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 01 November 2023 M  
17 Rabiul Akhir 1445 H  
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



**DR. SYAHRUL AKMAL LATIF, M.Si**  
NPK/080102337

Dibagikan :  
Rektor UIR  
Ka. Biro Keuangan UIR  
Wakil Dekan I FISIPOL UIR  
Ketua Prodi Administrasi Publik FISIPOL UIR



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email fsiipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI (S1) ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU

### Bismillahirrohmannirohim

Penguji Ujian Skripsi Tahun Akademik 2023/2024 Program Studi (S1) Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dengan susunan sebagai berikut :

| NAMA PENGUJI                | JABATAN    | TANDA TANGAN |
|-----------------------------|------------|--------------|
| Lilis Suriani, S.Sos., M.Si | Ketua      |              |
| Eko Handrian, S.Sos., M.Si  | Sekretaris |              |
| Kartius, S.Sos., M.AP       | Anggota    |              |

Pada hari Kamis Tanggal 02 November 2023 Jam ..... WIB telah menguji Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik:

|                 |                               |                        |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| NAMA            | : Yuni Ashara                 | Tanda Tangan Peserta : |
| Nomor Mahasiswa | : 197110490                   |                        |
| Nilai Sementara | : 3,68                        |                        |
| Pembimbing      | : Lilis Suriani, S.Sos., M.Si |                        |

Setelah Tim Penguji mengadakan Sidang dan menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya Mahasiswa tersebut dinyatakan :

|       |           |
|-------|-----------|
| LULUS | MENGULANG |
|-------|-----------|

DENGAN NILAI : **A-**

Pernyataan:

Dekan,

**dra Safri, S.Sos., M.Si**

Wakil Dekan I Bid. Akademik

Pekanbaru,  
Ketua Tim Penguji,

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yuni Ashara  
NPM : 197110490  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswi bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 02 November 2023

Ketua

An. Tim Penguji  
Sekretaris



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

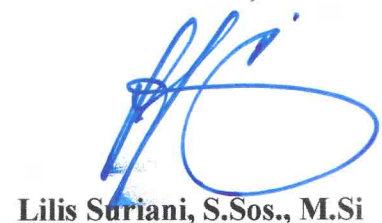
Turut Menyetujui,

Mengetahui  
Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik  
Ketua Prodi,



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa bersyukur atas limpahan rahmatmu, segala petunjuk dari Mu menuntunku menuju kejalan Mu. Rasa cinta dan kasih yang tulus selama ini menyertai perjalananku, serta berfikir otakku. Pelajaran berharga dalam hidupku yang akan membautku selalu tegar hingga membuatku semakin melihat besarnya keangungan Mu.

Sembah sujudku dan seiring syukur padamu Tuhan Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku kepada orang yang paling aku cintai dan aku sayangi khusus nya kepada Ayahku dan Ibuku. Dan tak lupa pula kepada seluruh keluargaku....

Tak terbilang rupiah, waktu, tak terhitung jerih payah, tak terhapus cucuran keringat yang mengalir, da nada hentinya untaian Do'a yang selalu engkau persembahkan untukku agar aku dapat bersekolah tinggi menggapai impian dan Cita-citaku, itu semua takkan pernah terbalskan.....

Serta untuk semua teman-teman seangkatan Administrasi Publik Angkatan 2019 yang seperjuangan denganku, Terima kasih atas bantuan dan saran dari mu dan selalu menjadi pendengar keluh kesahku, tanpa kalian aku takkan bisa sampai ke titik ini.....

Ini bukanlah akhir dari perjuanganku, tapi ini adalah awal dari kesuksesanku.  
Terimakasih untuk semuanya.....

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat hidayah dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat" Tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi SH. MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan berusaha maksimal dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini dengan benar hingga dapat diseminarkan.
4. Bapak Eko Handrian, S.Sos.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Seluruh Staff Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam mengurus segala keperluan, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Terkhusus dan istimewa penulis persembahkan untuk Ayahanda tercinta Bapak Asyudin dan Ibunda tercinta ibu Yusnidar serta Kakak saya Sri



Noviani dan Adek saya Ridho Satria Tri Nanda yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi penulis hingga selesainya penulisan usulan penelitian ini.

8. Sahabat kecilku tersayang yang tidak pernah bosan mendengar curhat dan keluh kisah ku sampai saat sekarang ini dengan ucapan terimakasih penulis persembahkan kepada Afiza Teo Rhane, Prada Nofriyan Ananda Michola, Rani Susanti, Risyia Agustin.
9. Teristimewa untuk teman-teman seperjuangan penulis yang selalu bersama-sama memberikan semangat kepada penulis dengan ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada Caissy Rahmadhani, Hanifa Reza, Yolanda Afrisila, Yuli Sapiti, Nor Amisa Aina, Josevin Anatasya, Ovi Syahfitri Pulungan, Yogi Hidayatullah, Sonia Rahma Indita, Sri Ratna Dewi, Sri Susilawati yang selalu menemani penulis serta memberikan support yang tiada hentinya.
10. Untuk teman-teman seangkatan dan seperjuangan Administrasi Publik 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani masa perkuliahan dan berbagi semangat dalam perjuangan mencari ilmu, terimakasih untuk kebersamaannya yaa teman-teman. Semoga kita sukses yaa.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sebab dalam kajian Ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interpretasi yang diberikan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan lainnya.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, 02 November 2023

Penulis

Ttd

**Yuni Ashara**

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>       | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>          | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>               | <b>iii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                       | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                     | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                     | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                  | <b>xii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                 | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                         | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                        | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 15          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....        | 15          |
| <b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN .....</b>         | <b>17</b>   |
| A. Studi Kepustakaan .....                    | 17          |
| 1. Konsep Administrasi.....                   | 17          |
| a. Fungsi Administrasi.....                   | 17          |
| b. Tujuan Administrasi .....                  | 18          |
| c. Unsur-Unsur Administrasi :.....            | 18          |
| 2. Konsep Organisasi .....                    | 23          |
| 3. Konsep Manajemen .....                     | 24          |
| 4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....  | 26          |
| 5. Konsep Kebijakan Publik .....              | 28          |
| 6. Pelaksanaan.....                           | 29          |
| 7. Konsep Evaluasi .....                      | 30          |
| 8. Konsep Pengelolaan .....                   | 35          |
| B. Penelitian Terdahulu.....                  | 36          |
| C. Kerangka Pikir .....                       | 40          |
| D. Konsep Operasional.....                    | 41          |
| E. Operasional Variabel .....                 | 44          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>        | <b>45</b>   |
| A. Tipe Penelitian.....                       | 45          |
| B. Lokasi Penelitian .....                    | 46          |
| C. Key Informan dan Informan Penelitian ..... | 46          |

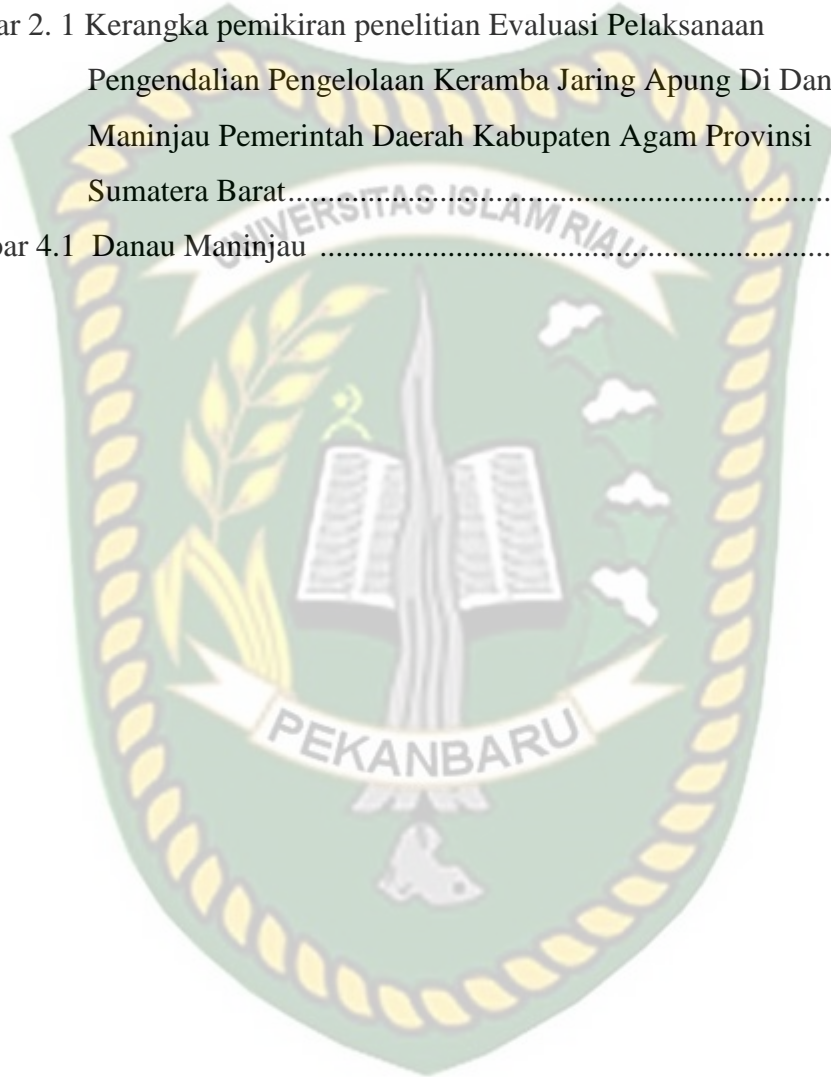
|   |            |
|---|------------|
| D. Teknik Penarikan Informan .....  | 47         |
| E. Jenis dan Sumber Data .....  | 48         |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....  | 49         |
| G. Teknik Analisis Data .....   | 50         |
| H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....  | 52         |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>   | <b>53</b>  |
| A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat .....  | 53         |
| B. Gambaran Umum Kabupaten Agam .....   | 54         |
| C. Gambaran Umum Danau Maninjau.....  | 56         |
| 1. Gambaran.....  | 56         |
| 2. Karakteristik Danau Maninjau.....  | 58         |
| D. Struktur Organisasi .....  | 59         |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>62</b>  |
| A. Identitas Informan .....   | 62         |
| 1. Jenis Kelamin Informan.....  | 62         |
| 2. Tingkat Pendidikan Informan.....   | 63         |
| 3. Tingkat Umur Informan.....   | 64         |
| B. Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring<br>Apung di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten<br>Agam Provinsi Sumatera Barat. ....                   | 64         |
| 1. Efektivitas .....  | 68         |
| 2. Efisiensi .....  | 72         |
| 3. Kecukupan .....  | 76         |
| 4. Responsivitas .....  | 80         |
| 5. Ketepatan .....  | 84         |
| C. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan<br>Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah<br>Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. .... | 87         |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>87</b>  |
| A. Kesimpulan.....  | 89         |
| B. Saran .....  | 91         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>93</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>102</b> |

## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 1. 1 | Jumlah Keramba Jaring Apung Setiap Nagari di Sekitar Danau Maninjau di Kabupaten Agam .....  | 11 |
| Tabel 1. 2 | Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau Sub Bidang Pengendalian KJA Danau Maninjau .....   | 12 |
| Tabel 2. 1 | Penelitian Terdahulu .....   | 38 |
| Tabel 2. 2 | Operasional Variabel penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.....                 | 45 |
| Tabel 3. 1 | Tabel Informan dan Key Informan Penelitian pada Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera barat..... | 48 |
| Tabel 3. 2 | Jadwal Kegiatan Penelitian .....   | 53 |
| Tabel 4.1  | Karakteristik Danau Maninjau .....   | 59 |
| Tabel 5.1  | Identitas informan berdasarkan jenis kelamin .....   | 64 |
| Tabel 5.2  | Identitas informan berdasarkan tingkat pendidikan.....   | 64 |
| Tabel 5.3  | Identitas informan berdasarkan tingkat usia .....  | 65 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Fenomena kerusakan Danau Maninjau .....   | 10 |
| Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran penelitian Evaluasi Pelaksanaan<br>Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau<br>Maninjau Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi<br>Sumatera Barat..... | 41 |
| Gambar 4.1 Danau Maninjau .....   | 60 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian.....  | 97  |
| Lampiran 2 : Daftar Pernyataan Wawancara Penelitian .....   | 102 |
| Lampiran 3 : Surat Riset .....  | 125 |
| Lampiran 4 : Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing .....  | 126 |
| Lampiran 5 : Surat Keterangan Jurnal Online.....  | 127 |
| Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi .....  | 128 |
| Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian DPMPTSP Provinsi Riau.....                                   | 131 |
| Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Riset Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam ..... | 132 |
| Lampiran 9 : Sertifikat Baca al-qur'an.....   | 133 |

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni Ashara  
Npm : 197110490  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 November 2023

Yang Menyatakan,



**Yuni Ashara**

**EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN  
KERAMBA JARING APUNG DI DANAU MANINJAU OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**Yuni Ashara**

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk Menganalisis dan mengetahui sejauh mana tingkat Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. Pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Camat Tanjung Raya, Satpol PP Kabupaten Agam dan juga Pemilik KJA serta masyarakat sekitar kawasan Danau Maninjau. Peran dari masing-masing pihak telah dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan dan Kebijakan daerah yang berlaku. Danau Maninjau merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang ada di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang menjadi fokus utama pemerintahan daerah yang memiliki wewenang dan kebijakan dalam menerapkan pengawasan terhadap kerusakannya serta pencemarannya. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kelestarian Danau Maninjau terdapat kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan salah satunya yakni pengelolaan keramba jaring apung. Tujuan dari kebijakan pengelolaan kawasan Danau Maninjau ialah agar dapat menghasilkan kawasan danau yang bersih, lestari, berbudaya serta berkelanjutan, sedangkan fungsi Pengelolaan kawasan danau Maninjau ialah agar menjaga kelestarian sumber daya alam serta kesejahteraan warga secara merata dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan melihat efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan.

**Kata Kunci : Danau Maninjau, Keramba Jaring Apung, Evaluasi Pelaksanaan.**



***EVALUATION OF FLOATING NET CAGE MANAGEMENT CONTROL IN  
MANINJAU LAKE BY AGAM REGENCY REGIONAL GOVERNMENT***

***WEST SUMATRA PROVINCE***

***ABSTRACT***

**By: Yuni Ashara**

The aim of this research is to analyze and determine the extent of implementation of management control for floating net cages in Lake Maninjau by the Regional Government of Agam Regency, West Sumatra Province. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The location of this research is Lake Maninjau, Tanjung Raya District, Agam Regency, at the Agam Regency Fisheries and Food Security Service. Control of the management of floating net cages in Lake Maninjau, Agam Regency is carried out by the Environmental Service, Food Security and Fisheries Service, Head of Tanjung Raya District, Satpol PP Agam Regency and also the KJA Owner and the community around the Lake Maninjau area. The role of each party has been carried out with reference to applicable regional regulations and policies. Lake Maninjau is a form of natural wealth in Agam Regency, West Sumatra Province which is the main focus of the regional government which has the authority and policy to implement monitoring of its damage and pollution. In the context of monitoring and controlling the sustainability of Lake Maninjau, there are activities to control and monitor pollution and damage, one of which is the management of floating net cages. The aim of the Lake Maninjau area management policy is to produce a clean, sustainable, cultural and sustainable lake area, while the management function of the Maninjau Lake area is to preserve natural resources and the welfare of residents in an equitable and sustainable manner. The results of the research show that the Evaluation of the Implementation of Management Control of Floating Net Cages in Lake Maninjau by the Regional Government of Agam Regency, West Sumatra Province was carried out by looking at effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness and accuracy.

**Keywords: Lake Maninjau, Floating Net Cages, Implementation Evaluation.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia Merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan swasta yang mana dalam satu negara, peran ketiganya tentunya sangatlah penting dalam menjalankan suatu negara, khususnya pemerintah indonesia sebagai insitusi yang memiliki kekuasaan serta mempunyai tujuan yang harus dicapai yang mana tujuan negara indonesia, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan pemerintah adalah meliputi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomis seluas-luas nya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia.

Dalam aspek pemerintahan ada hal yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintah yaitu dalam melayani masyarakatnya dalam berbagai aktivitas masyarakat. Pada hakekatnya pemerintah diadakan awalnya untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dasar dari masyarakat.

Adapun urusan pemerintahan yang terdapat undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuh menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Terdapat 6 urusan pemerintahan absolut meliputi:
  - a. Politik luar negeri
  - b. Pertahanan
  - c. Keamanan
  - d. Yustisi
  - e. Moneter dan fiksal nasional dan
  - f. Agama
2. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
  - Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu meliputi:
    - a. Pendidikan
    - b. Kesehatan
    - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
    - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
    - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
    - f. Sosial

- Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
  - a. Tenaga kerja
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - c. Pangan
  - d. Pertanahan
  - e. **Lingkungan hidup**
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - i. Perhubungan
  - j. Komunikasi dan informatika
  - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
  - l. Penanaman modal
  - m. Kependudukan dan olahraga
  - n. Statistik
  - o. Persandian
  - p. Kebudayaan
  - q. Perpustakaan dan
  - r. Kearsipan
- Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana meliputi
  - a. **Kelautan dan perikanan**
  - b. Pariwisata
  - c. Pertanian
  - d. Kehutan
  - e. Energi dan sumber daya mineral
  - f. Perdagangan
  - g. Perindustrian dan
  - h. Transmigrasi

Fungsi pemerintah menunjukkan dua macam fungsi pemerintah yang pertama adalah fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatkannya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Fungsi pemerintah yang kedua adalah fungsi

sekunder yaitu fungsi yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup semakin kuat dan semakin kuat dan semakin integratif masyarakat yang diperintah semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Pemerintah daerah pada dasarnya mempunyai dua peran yaitu sebagai lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintahan daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan serta memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah atau pemerintah artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan aturan hukum dan peraturan undang-undangan yang ditetapkan oleh daerah melalui dewan perwakilan rakyat daerah.

Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan asas otonom daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sebagai daerah otonom, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna penyelenggaraan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakasa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 , Dinas menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang-bidang pangan dan perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang-bidang pangan dan perikanan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam Seksi Pemulihan Pelestarian Lingkungan mempunyai uraian tugas antara lain :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas air laut;
- d. Menyusun regulasi yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan;
- e. Memfasilitasi kegiatan pemulihan akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan (air, udara, dan air laut); dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Salah satu bentuk kekayaan alam yang dikelola oleh pemerintahan daerah adalah danau. Danau merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang ada di Indonesia. Danau adalah sejumlah air (tawar atau asin yang terakumulasi di suatu tempat yang cukup luas, yang terdapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Karena memiliki daya tampung air yang cukup besar maka keberadaan danau memberikan banyak manfaat bagi kehidupan disekitarnya antara lain untuk menyediakan air bersih, pembangkit listrik, sarana irigasi, media pembudidayaan perikanan, tempat rekreasi, pengendalian bencana alam dan habitat bagi pertumbuhan satwa.

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan penopang sistem kehidupan. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi terutama manusia yang populasinya semakin besar. Manusia sebagai salah satu bagian dalam sistem kehidupan terlalu berlebihan dalam manipulasi alam demi peningkatan kesejahteraannya tanpa berpikir terhadap dampak negatif pada berkelanjutan kehidupan itu sendiri. Pencemaran serta kerusakan lingkungan Danau Maninjau merupakan fokus utama bagi pemerintahan untuk melaksanakan wewenang dan kebijakan dalam menerapkan pengawasan terhadap kerusakannya serta pencemaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau perencanaan pengelolaan kelestarian kawasan danau dilakukan secara ko-manajemen meliputi tindakan rencana, terpadu, menyeluruh, partisipatif dan berkelanjutan serta mengadopsi kearifan lokal dan koordinasikan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) salah satunya adalah rencana induk kawasan budidaya, pemanfaatan kawasan budidaya, pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi perikanan pembudidayaan ikan adalah upaya untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani mengolah dan atau mengawetkannya.

Tujuan dari kebijakan pengelolaan kawasan danau ialah agar dapat menghasilkan kawasan danau yang bersih, lestari, berbudaya serta berkelanjutan, sedangkan Fungsi Pengelolaan kawasan danau ialah agar menjaga kelestarian sumber daya alam serta kesejahteraan warga secara merata dan berkelanjutan. Untuk bisa mencapai tujuan dari Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Agam telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau sebagaimana yang dimaksud



pada pasal (6) Pelestarian lingkungan merupakan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat. Perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk merubah ekosistemnya, dapat mengakibatkan terjadinya perusakan lingkungan baik dampaknya dirasakan sekarang maupun dimasa yang akan datang. pelestarian pengelolaan kawasan danau maninjau dilaksanakan oleh lembaga pengelola dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan daya dukung dan daya tampung. perairan danau untuk berkelanjutan fungsi-fungsi ekosistem danau dilakukan melalui upaya :

1. Melestarikan daerah tangkapan air daerah aliran sungai dan wadah air
2. Mempertahankan dan melindungi keanekaragaman sumber daya hayati
3. Mencegah dan melarang penerbangan liar
4. Mencegah dan menanggulangi pencemaran kawasan danau
5. Mewujudkan kawasan konservasi
6. Melarang penguasaan badan air danau dan sempadan danau secara tidak sah
7. Penerapan dan pengelolaan pertanian, peternakan dan perikanan yang ramah lingkungan
8. Memperbaiki jalur migrasi ikan dari sungai ke danau
9. Penerbaran benih ikan yang hampir punah

Dari sembilan aksi yang akan dilakukan pada tahap pelestarian dalam upaya mempertahankan dan melindungi keanekaragaman sumberdaya hayati pengembangan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung perairan danau. Daya dukung dan daya tambung untuk KJA dikawasan danau mengacu pada kemampuan perairan Danau Maninjau mencerna limbah organik dari kegiatan perikanan yang setara dengan 1.500 (Seribu Lima Ratus) unit dan/ atau 6000 (Enam Ribu) petak dengan ukuran 5x5 (lima kali lima) meter persegi per petak keramba.

Dalam rangka Pengendalian Keramba Jaring Apung dan Penanggulangan Pencemaran Danau Maninjau telah dibentuk Tim Terpadu Penyelamatan Danau melalui Keputusan Bupati Agam Nomor 263 Tahun 2021 tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau.

Pembudidayaan ikan di Danau Maninjau dengan keramba jaring apung atau yang disingkat dengan KJA suatu sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang kerangkanya terbuat dari bambu, kayu, pipa pralon atau besi berbentuk persegi yang diberi jaring dan diberi pelampung seperti drum plastik atau streoform agar wadah tersebut tetap terapung didalam air. Banyak masyarakat yang melakukan pembudidayaan ikan di Danau Maninjau adalah salah satu faktor yang menyebabkan kelestarian berkurang mengakibatkan banyaknya ikan mati hal ini dibuktikan oleh gambar 1.1 yaitu :

### Gambar 1. 1

#### Fenomena kerusakan Danau Maninjau



Sumber : hasil survey awal peneliti diakses pada 2 januari 2023

Kerusakan di Danau Maninjau diakibatkan oleh berkembang pesatnya pertumbuhan Keramba Jaring Apung (KJA). Perkembangan Keramba Jaring Apung (KJA) dengan memberikan pakan ikan secara berlebihan dengan tujuan agar ikan cepat besar menyebabkan banyak pakan ikan yang menumpuk di dasar danau. Dengan perkembangan KJA yang pesat dan pakan ikan yang menumpuk di dasar danau menyebabkan kelestarian danau berkurang. Hal ini peneliti kutip dari salah satu berita padang.viva.co.id sebagai berikut :

“Ribuan ikan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Maninjau di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mati, Kamis 2 Maret 2023. Kematian dalam jumlah banyak ikan jenis Nila tersebut, rutin terjadi setiap tahun. Beragam persepsi penyebab kematian ikan tersebut. Ada yang menyebut oleh faktor cuaca buruk, banyaknya endapan pakan yang menyebabkan kadar oksigen air Danau Maninjau berkurang dan ada juga yang bilang disebabkan oleh faktor tubo (racun) belerang meningkat, Danau Maninjau merupakan danau vulkanik.

Berdasar kutipan diatas peneliti menemukan bukti bahwa kelestarian Danau Maninjau terganggu oleh Keramba Jaring Apung (KJA) yang tersebar disekitar danau. Karena daya tampung Keramba Jaring Apung (KJA) di danau sudah di atur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau , Namun pada kenyataannya jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) terus bertambah setiap tahunnya seperti pada Tabel 1.1

**Tabel 1. 1**

**Jumlah Keramba Jaring Apung Setiap Nagari di Sekitar Danau Maninjau di Kabupaten Agam**

| No            | Nagari             | 2021               |                      | 2022               |                      |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |                    | Jumlah KJA (Petak) | Jumlah Pemilik Orang | Jumlah KJA (Petak) | Jumlah Pemilik Orang |
| (1)           | (2)                | (3)                | (4)                  | (5)                | (6)                  |
| 1.            | Koto Malintang     | 4,658              | 175                  | 5,647              | 199                  |
| 2.            | Nagari Koto Gadang | 796                | 110                  | 1,726              | 119                  |
| 3.            | Koto Kaciak        | 624                | 51                   | 791                | 41                   |
| 4.            | Duo Koto           | 549                | 45                   | 1,065              | 43                   |
| 5.            | Bayua              | 3,256              | 264                  | 4,122              | 271                  |
| 6.            | Maninjau           | 1,376              | 138                  | 1,561              | 130                  |
| 7.            | Sungai Batang      | 2,096              | 154                  | 2,582              | 240                  |
| 8.            | Tanjung Sani       | 4,062              | 496                  | 5,865              | 635                  |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>17,417</b>      | <b>1,433</b>         | <b>23,359</b>      | <b>1,678</b>         |

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam (2022)

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa banyak jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) sebagaimana data yang telah diperoleh oleh peneliti pada tahun 2021 sebanyak 17,417 dan pada tahun 2022 sebanyak 23,359. Artinya apa yang diharapkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 belum terlaksana dengan baik.

Pertumbuhan Keramba Jaring Apung (KJA) dipacu adanya investor yang memberikan dana untuk pembuatan Keramba Jaring Apung (KJA), dan masyarakat hanya sebagai pekerja dan menjalankan Keramba Jaring Apung (KJA) yang di danai oleh investor. Masyarakat dijadikan tameng oleh para investor, karena masyarakat mempunyai hak untuk membuat keramba.

Walaupun Pemerintah Daerah sudah membentuk Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, akan tetapi Tim tersebut belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada tim terpadu penyelamatan Danau Maninjau juga sudah ditetapkan tugas dari instansi yang terlibat didalamnya, dimana tersebut terdapat sub bidang pengendalian Keramba Jaring Apung (KJA) pada tabel 1.2 :

**Tabel 1. 2**

**Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau Sub Bidang Pengendalian  
Keramba Jaring Apung Danau Maninjau**

| No | Dinas                                       | Tugas  |
|----|---|--|
| 1. | Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinir pengendalian keramba jaring apung</li> <li>b. Melakukan bimbingan teknis budidaya keramba jaring apung ramah lingkungan</li> <li>c. Mengurangi dan mengendalikan jumlah keramba jaring apung</li> <li>d. Melaksanakan moratorium penambahan keramba jaring apung</li> <li>e. Mengatasi dan memitigasi akses atas kebijakan moratorium penambahan, pengurangan dan pengendalian jumlah keramba jaring apung</li> <li>f. Mengoordinir pengawasan dan penindakan pelanggaran regulasi terkait pengelolaan danau dan</li> <li>g. Mengoordinir pengembangan dan penerapan publikasi dan sistem informasi terpadu terkait pengendalian pencemaran danau.</li> </ul> |

Disamping belum terlaksananya tugas Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau sesuai dengan harapan, pengendalian dalam perkembangan KJA juga terkait dengan belum adanya peraturan zonasi.

Peraturan zonasi adalah peraturan yang mengatur tentang letak Keramba Jaring Apung (KJA), agar pemanfaatan kawasan Danau Maninjau menjadi efektif. Peraturan tersebut bertujuan untuk pemanfaatan Danau Maninjau seperti sedia kalanya tanpa mengurangi fungsinya dan meminimalisasi terjadinya pencemaran atau kerusakan pada Danau Maninjau. Masalah kelestarian Danau Maninjau ini disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat tidak sadar akan pelestarian danau, dan mereka hanya mementingkan kepentingan sesaat tanpa memikirkan untuk masa yang akan datang.

Pemerintah daerah juga telah menetapkan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap orang yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Namun pada kenyataannya Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dibantah oleh masyarakat dan mereka menganggap remeh dengan tindakan pidana yang sudah ditentukan. karena peraturan yang di buat dianggap merugikan masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah berupa peraturan yang membatasi banyak Keramba Jaring Apung (KJA) dibatasi maka mata pencarian masyarakat

berkurang. Dampak yang terburuknya adalah hilangnya mata pencarian masyarakat. Penolakan dan bantahan oleh masyarakat yang takut kehilangan mata pencarian.

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis mengemukakan beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Teridentifikasi bahwa kerusakan pelestarian di danau maninjau diakibatkan perkembangan KJA yang sangat pesat sehingga melebihi batas yang terdapat dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau Pasal (7) yang berbunyi Jumlah daya dukung dan daya tampung KJA danau maninjau ditetapkan sebanyak 6000 Petak Namun pada kenyataannya jumlah KJA terus bertambah setiap tahunnya.
2. Teridentifikasi bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian danau maninjau.
3. Kurangnya Pemerintah Daerah dalam Menegaskan aturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau sehingga Pengendalian Keramba Jaring Apung terus berkembang dan mengakibatkan danau maninjau rusak dan hilangnya mata pencarian masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan fenomena dan permasalahan di atas maka dalam penelitian ini perlu menetapkan perumusan masalah agar penelitian ini terarah maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut : **Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ?**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- b) Untuk mengetahui Faktor apa saja menjadi Hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.



## 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a) Kegunaan teoritis, yakni diharapkan hasil ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Selain itu penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- b) Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi berupa hasil kajian kepada Pemerintah Kabupaten Agam terutama tentang pengelola KJA. Sesuai dengan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau.
- c) Kegunaan akademik, yakni hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan atau bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya untuk melakukan penelitian sejenis.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain :

##### 1. Konsep Administrasi

Sesuai Aliran Adms di Prof. DR. H. Wirman Syafri, M.Si (2012:8) Organisasi adalah kemampuan untuk memfasilitasi berbagai kekuatan sosial yang sering saling bertikai dalam satu makhluk hidup sedemikian rupa sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan. Sementara itu, menurut Sondang P. Siagian dalam Prof. DR. H. Wirman Syafri, M.Si (2012:9) Organisasi adalah keseluruhan jalannya partisipasi antara paling sedikit dua orang dengan tujuan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. **Fungsi Administrasi**

Menurut Siagian (2014:4) Fungsi Administrasi terdiri dari :

- 1) Penyusunan (Arranging) Penyusunan merupakan kemampuan pengaturan yang utama, sebab tanpa adanya penyusunan tidak ada gunanya melakukan kegiatan-kegiatan khusus untuk mencapai tujuan.
- 2) Penyelesaian Penyelesaian adalah tahap selanjutnya dalam mengikuti susunan yang telah disusun.

3) Pemberian Inspirasi (Rousing), khususnya cara yang paling umum dalam memberikan tenaga kerja kepada wakil-wakil, sehingga mereka akan bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hierarki dengan berhasil dan produktif.

4) Pengawasan (Controlling) adalah cara paling umum untuk memperhatikan pelaksanaan semua latihan hierarkis sehingga semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya.

5) Appraisal (Penilaian) Evaluasi difokuskan pada tahapan tertentu dalam suatu siklus setelah tahapan tersebut selesai seluruhnya.

**a. Tujuan Administrasi**

- 1) Memberikan data yang lengkap dan penting kepada siapa saja, kapan dan di mana diperlukan untuk pelaksanaan organisasi.
- 2) Mengatur semua pekerjaan kantor dan otoritas untuk menjamin konsistensi dengan norma kualitas yang dijunjung tinggi, batas waktu dan teknik yang sesuai.
- 3) Organisasi mengharapkan untuk membuat permintaan dalam latihan otoritatif sehingga semua yang berhubungan dengan organisasi dapat terwakili.

**b. Unsur-Unsur Administrasi :**

Menurut Wirman Syafri (2012:11-13) Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok orang yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan ersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-

unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai. Para sarjana ilmu administrasi tampak telah sepakat bahwa adanya unsur-unsur administasi adalah sebagai berikut :

- 1) Organisasi
- 2) Manajemen
- 3) Komunikasi
- 4) Kepegawaian
- 5) Keuangan
- 6) Perbekalan
- 7) Tata Usaha
- 8) Hubungan Masyarakat

Menurut Siagan dalam Drs. Zulkifli, M.Si (2009;11) Administrasi yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum-nya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna berhasil guna.

Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Silalahi dalam Drs. Zulkifli, M.Si 2009;11)

Menurut The Liang Gie dalam Drs. Zulkifli, M.Si (2009;14) Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Pekerjaan pokok yang dimaksudkan mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi :

- a) Organisasi (tatakeragaan)
- b) Manajemen (tatapimpinan)
- c) Komunikasi (tatahubungan)
- d) Informasi (tataketerangan)
- e) Personalia (tatakepegawaian)
- f) Finansla (tatakeuangan)
- g) Material (tatapembekalan)
- h) Relasi Publik (tatahumas)

Menurut Siagan dalam Zulkifli 2005:19) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Zulkifli 2005:16) Konsep administrasi didefinisikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis. Dalam studi administrasi di konsepkan menjadi dua yaitu :

- a) Administrasi dalam arti sempit

Pada konteks ini adminitrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesektariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

- b) Administrasi dalam arti luas

Pada konteks ini mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau jumlah yang telah disepekat sebelumnya.

Menurut Nicholas Henry dalam Beddy Iriawan Maksudi (2017:225) Administrasi publik merupakan kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi negara dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien.

Menurut Willoughby dalam Beddy Iriawan Maksudi (2017:225) berpendapat bahwa Administrasi Publik adalah fungsi untuk menjalankan hukum dengan sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh badan-badan legislatif dan ditafsirkan oleh badan-badan yudikatif pemerintah. Sedangkan Leonard D. White dalam Beddy Iriawan Maksudi (2017:225) mengemukakan bahwa Administrasi Publik terdiri dari semua tindakan yang ditujukan kepada pelaksana atau pemaksaan kebijakan negara.

Menurut Gerald Caiden dalam Beddy Iriawan Maksudi (2017:236) administrasi publik telah diasumsikan memiliki peran penting dalam masyarakat modern kontemporer sebagai :

- 1) Pelestarian pemerintahan
- 2) Pemeliharaan stabilitas dan ketertiban
- 3) Pelembagaan perubahan sosial ekonomi

- 4) Pengelolaan layanan komersial skala besar
- 5) Memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
- 6) Perlindungan bagian lemah dari masyarakat
- 7) Pembentukan opini publik dan
- 8) Memengaruhi kebijakan publik.

Menurut Dimock dan Dimock dalam Beddy Iriawan Maksudi (2017:224) Administrasi Publik merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari suatu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa, disusun, digerakan dan kemudian dikendalikan.

Administrasi publik menurut pendapat Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah Proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, meng-implementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Pfiffner & Presthus dalam Prof. DR. H. Wirman Syafri, M.Si (2012:20) Administrasi Publik dapat didefinisikan sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok atau menjalankan kebijakan publik. Sedangkan Menurut Woodrow Wilson dalam Prof. DR. H. Wirman Syafri, M.Si (2012:21) Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

## 2. Konsep Organisasi

Sebagaimana dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dalam Beddy Iriawan Buati (2017:38) Perkumpulan dicirikan sebagai solidaritas sosial yang sengaja direncanakan, dengan batas-batas yang dapat dikenali, berhubungan dengan premis yang umumnya persisten untuk mencapai tujuan bersama atau kumpulan tujuan.

Menurut James D Mooney, asosiasi adalah suatu bentuk hubungan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, menurut John D. Millet, sebuah asosiasi adalah orang-orang yang bekerja sama dan oleh karena itu, di dalamnya terdapat ciri-ciri hubungan antarmanusia yang muncul dalam aktivitas kelompok. (Dalam Beddy Iriawan Makti 2017:39)

Sesuai Siagan dalam Drs. Zulkifli, M.Si (2009:15) membentuk pengertian perkumpulan sebagai segala bentuk hubungan antara sekurang-kurangnya dua individu yang bekerja sama dan terikat secara resmi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dimana terdapat satu atau beberapa kelompok yang disebut atasan dan satu atau beberapa kelompok. sebuah pertemuan yang disebut bawahan.

Sesuai Massie di Drs. Zulkifli, M.Si dan Dr. H. Moris A. Yogia, M.Si (2009:16) Asosiasi adalah perkumpulan kooperatif yang membagi tugas antar individu, memutuskan hubungan kerja dan menggabungkan kegiatan mereka untuk mencapai tujuan bersama.



Sesuai Waldo dalam Drs. Zulkifli, M.Si dan Dr. H. Moris A. Yogja, M.Si (2009:16) Asosiasi adalah suatu desain hubungan relasional dalam pandangan kekuasaan formal dan adat istiadat dalam kerangka manajerial.

### **3. Konsep Manajemen**

Seperti yang dikemukakan oleh Ricky W. Griffin (dalam Dr. Sarinah, S.Ag, M.Pd. I. dan Dr Mardalena, M.Pd. BI 2017:1) mendefinisikan eksekutif sebagai suatu kursus yang mengatur, memilah, merencanakan dan mengendalikan aset untuk mencapai target dengan sukses dan mahir.

Menurut Luther Gulick (dalam Eisha Lalatuva, dkk. 2022: 3) Eksekutif adalah bidang ilmu yang sengaja mencari pemahaman tentang alasan mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat pengaturan partisipasi ini lebih bermanfaat bagi umat manusia.

Menurut Massie dan Douglas (Eisha Lalatuva, dkk 2022:4) Eksekutif adalah interaksi di mana suatu pertemuan bekerja sama untuk membimbing orang lain agar mencapai tujuan yang sama. Sementara itu, menurut Stephen P. Robbins, para eksekutif adalah cara yang paling umum dalam mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan kerja sehingga dapat diselesaikan secara produktif dan sungguh-sungguh, dengan dan melalui orang lain.

Sesuai Terry (dalam Zulkifli, 2014: 18) mendefinisikan gagasan eksekutif sebagai suatu siklus biasa yang terdiri dari kegiatan mengatur, mengkoordinasikan, mendorong dan mengendalikan dimana dalam setiap bidang baik informasi maupun keterampilan dimanfaatkan dan diikuti secara berurutan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2014; 19) Eksekutif adalah kesanggupan atau kesanggupan untuk memperoleh dorongan untuk mencapai tujuan melalui latihan orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli, 2014; 20) Dewan adalah suatu kegiatan yang sepenuhnya bertujuan untuk mencapai hubungan yang bijaksana dan menyenangkan dalam kerangka manajerial.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2014: 17) Eksekutif adalah metode yang terlibat dalam pengaturan, koordinasi, penggerak dan pengendalian yang dilakukan oleh individu hierarkis dan memanfaatkan semua aset otoritatif untuk mencapai tujuan hierarki yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) Dewan dicirikan sebagai kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan permintaan untuk mencapai tujuan melalui latihan orang lain.

Handoko (2009:8) mengatakan siklus ini terdiri dari latihan pengurus, yaitu persiapan khusus, penyusunan, koordinasi dan pengawasan. Menurut Handoko (2009: 23-25) Dewan mempunyai 5 kemampuan yang menurut penciptanya paling penting, yaitu:

1. Perencanaan, rencana-rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu.
2. Pengorganisasian, adalah 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi,2) perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan, 3) penugasan tanggung

jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, bagi dan koordinasikan.

3. Penyusunan personalia, adalah penarikan, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.
4. Pengarahan, yang berfungsi sebagai untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.
5. Pengawasan, adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

#### **4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menurut Hasibuan (2010: 10), aset manusia para eksekutif adalah suatu ilmu dan keahlian yang mengatur hubungan dan pekerjaan angkatan kerja agar berhasil dan produktif dalam membantu pemahaman tujuan organisasi, perwakilan dan masyarakat.

Sedangkan menurut Kamsir (2014: 157) Aset Manusia Eksekutif adalah suatu gagasan yang berkaitan dengan strategi, teknik dan praktik tentang cara yang paling efisien untuk mengawasi atau mengawasi individu-individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai Hasibuan (2013:10) Aset Manusia Eksekutif merupakan kekhususan dalam menangani hubungan dan pekerjaan angkatan kerja sehingga

menarik dan efektif dalam membantu pemahaman tujuan organisasi, perwakilan dan masyarakat.

Sesuai dengan A.F Stoner (dalam Sinambella, 2016: 7), aset manusia dewan merupakan suatu sistem yang berkesinambungan yang tujuannya adalah untuk memasuki suatu perkumpulan atau perkumpulan dengan individu-individu yang ideal untuk ditempatkan pada posisi yang tepat ketika perkumpulan membutuhkannya.

Berdasarkan penilaian di atas, maka dapat diasumsikan bahwa SDM adalah individu yang melakukan latihan dengan kemampuan, daya pikir, dan kekuatan nyata yang digerakkan oleh setiap orang.

Sasaran MSDM sangat sulit untuk direncanakan dengan tepat mengingat fakta bahwa sasaran tersebut berbeda-beda dan bergantung pada fase transformatif yang terjadi di setiap organisasi. Menurut Cushway (dalam Sutrisno, 2017:7) tujuannya antara lain:

1. Memberikan perimbangan manajemen dalam memberikan kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerjaan yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara ilegal.
2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya.
3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang terkait implikasi SDM.

4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer untuk mencapai tujuannya.

## 5. Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti negara kota (polis), kemudian diubah ke dalam bahasa Latin *polita* yang berarti negara. Yang kemudian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah atau kata (*Policie*) yang mengandung arti hal-hal yang berhubungan dengan usaha pemerintah atau organisasi pemerintah. Dalam rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi dicirikan sebagai suatu perkembangan gagasan dan aturan yang menyusun diagram dan premis rencana dalam melakukan pekerjaan, administrasi dan pendekatan bertindak (dalam kaitannya dengan pemerintah, asosiasi, dan sebagainya.); proklamasi keyakinan, tujuan, standar dan aturan bagi para eksekutif dengan tujuan akhir untuk mencapai target.

Menurut Ealau dan Pewitt dalam Junaidy (2021:43), strategi adalah praktik yang sah, digambarkan dengan perilaku yang mantap dan berulang-ulang, baik dari orang yang membuat maupun orang yang melakukan pendekatan tersebut. Sedangkan menurut Thomas Color (dalam Junaidi, 2021:43) menyatakan bahwa strategi adalah sesuatu yang sudah selesai atau belum dilakukan oleh otoritas publik, mengapa strategi itu harus diselesaikan dan apakah manfaat untuk hidup berdampingan harus menjadi pemikiran yang komprehensif sehingga Pendekatan ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi warganya dan berdampak kecil serta umumnya tidak menimbulkan permasalahan negatif, di sinilah otoritas publik harus pandai dalam menata tatanan publik.

Menurut Thomas Color dalam Subarsono 2005: 2) Strategi Publik adalah segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh otoritas publik (public pendekatan adalah segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh otoritas publik). Pengertian strategi publik menurut Thomas Color sebenarnya bermaksud bahwa (1) Penataan publik dilakukan oleh badan pemerintah, bukan perkumpulan swasta (2) Pendekatan publik menyangkut keputusan-keputusan yang sebaiknya diambil atau tidak.

#### **6. Pelaksanaan**

Menurut Syafie (2011: 101) Eksekusi adalah kegiatan untuk menjamin bahwa semua individu yang berkumpul akan berusaha mencapai fokus sesuai persiapan administratif dan upaya hierarkis.

Sementara itu, menurut Brayfeld dan Crockett oleh Vrom, pelaksanaan pekerjaan tidak memiliki bidang kekuatan satu sama lain dalam modal sederhana (dalam Shobarudinn 2005: 154)

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perkumpulan yang direncanakan sedemikian rupa, secara metodelis untuk mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh dan efisien. Selain itu, eksekusi merupakan usaha atau gerakan pengaturan suatu strategi yang tidak kaku dan disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan peraturan yang membatasi serta memuat nasehat dan landasan yang memadai, tanpa memandang siapa yang melaksanakannya dan di mana tindakan itu dilakukan. Suatu jenis eksekusi akan berjalan dengan baik sesuai asumsi,

khususnya dengan adanya dorongan persuasif yang dapat dijadikan modal eksekusi.

## **7. Konsep Evaluasi**

Penilaian strategi adalah suatu gerakan untuk mensurvei penyajian suatu tindakan, sedangkan Wiliam N. Dunn (2003) menyatakan bahwa istilah penilaian dapat diartikan sebagai mendokumentasikan, memberi angka, dan mensurvei, kata-kata yang mengungkapkan upaya untuk menelaah strategi menghasilkan satuan-satuan yang signifikan. bernilai. Jadi, penilaian diharapkan sebagai penciptaan data yang dihubungkan dengan nilai dan keuntungan dari konsekuensi suatu strategi (dalam Junaidy 2021;43).

### **a. Tujuan dan Fungsi Evaluasi**

Tujuan Evaluasi menurut Wiliam N.Dunn :

1. Memperkirakan dampak suatu program/strategi terhadap kehidupan individu dengan membandingkan keadaan saat program tersebut dilakukan.
2. Mendapatkan data tentang pelaksanaan strategi dan kesamaan program survei serta perubahan rencana.
3. Memberikan kritik kepada pimpinan untuk perbaikan/eksekusi yang luar biasa.
4. Berikan usulan kepada pembuat strategi untuk dinamika program tambahan di kemudian hari.

Fungsi Evaluasi menurut Wiliam N.Dunn :

1. Memberikan klarifikasi yang konsisten mengenai kebenaran pelaksanaan suatu program/strategi. Dalam studi penilaian, penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap hubungan sebab akibat atau sebab-dampak.
2. Memperkirakan konsistensi berarti mempunyai pilihan untuk melihat kesamaan antara pelaksanaan dan norma serta metode yang ditetapkan.
3. Memimpin evaluasi untuk melihat apakah hasil strategi telah mencapai tujuan yang diharapkan, apakah terdapat jeda dan penyimpangan serta penggunaan rencana keuangan, apakah terdapat penyimpangan terhadap tujuan dan pelaksanaan program.
4. Pembukuan untuk melihat dan mengukur hasil finansial dari pendekatan.

#### b. Kriteria Evaluasi

Untuk meninjau kemajuan suatu strategi, beberapa penanda harus dibuat karena penggunaan satu penunjuk saja akan berbahaya, karena dalam hasil evaluasi bisa jadi hanya sepihak. Petunjuk atau standar yang dibuat oleh Dunn (1999) mencakup penanda berikut:

| <b>Tipe Kriteria</b> | <b>Pertanyaan</b>   |
|----------------------|---|
| Efektivitas          | Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?   |
| Efisiensi            | Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?                        |
| Kecukupan            | Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?                            |
| Perataan             | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda? |
| Responsivitas        | Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? |
| Ketepatan            | Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?                      |



Menurut Zulkifli (2009:137), evaluasi (penilaian) adalah kegiatan membandingkan pelaksanaan tugas baik yang sudah selesai maupun yang sedang dikerjakan dengan standar atau target (rencana) yang telah ditetapkan. Sedangkan Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari semua.

Menurut Sudarman (dalam Junaidy, 2021:43) Penilaian (evaluasi) adalah suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil seharusnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi yaitu:

1. Evaluasi merupakan fungsi organik karena merupakan penentu hidup dan matinya suatu organisasi.
2. Evaluasi merupakan proses karena terus-menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen, dan
3. Evaluasi merupakan (border) yang menjadi pemisah antara hasil sebenarnya dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Menurut Leo Agustino (dalam Sofyan 2021) Evaluasi adalah ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Evaluasi Menurut Akdon (dalam Badrudin, 2015:260) adalah penilaian dan evaluasi keberhasilan pencapaian output dan outcome organisasi mencapai tujuan dan sasaran adalah focus dari kegiatan pengukuran kinerja. Adapun Akdon

(2011) mengemukakan indikator yang umumnya digunakan yaitu indikator input, output, outcome, benefit dan impact.

1. Input (Masukan) adalah indikator segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi dan kebijakan.
2. Output (Keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang berupa fisik dan non fisik.
3. Outcome (Hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek fungsi).
4. Benefit (Manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Impact (Dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut Arifin (dalam Kusmiyati 2022:11) mengemukakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari pada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil keputusan.

Nurcholis (2007:277) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh terhadap input, proses, output dan outcome dari kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya evaluasi membutuhkan sebuah skema umum penilaian, yaitu:

1. Input, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, sarana atau prasarana, sosialisasi kebijakan.
2. Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, penertiban, dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Output (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan, output meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Outcome (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementator yang terlibat didalamnya.

Menurut Suchman dalam Nugroho (2003:199) bahwa “Enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

Untuk mempermudah mengidentifikasi tujuan evaluasi program, kita harus memperhatikan unsur-unsur dalam kegiatan atau penggarapannya. Ada tiga unsur penting di dalam kegiatan atau penggarapan suatu kegiatan, yaitu:

- a) *What* = apa yang dikerjakan
- b) *Who* = siapa yang mengerjakannya, dan
- c) *How* = bagaimana cara mengerjakannya

- 2) Analisis terhadap masalah

Merupakan kemampuan untuk mengenal elemen-elemen situasi dalam permasalahan dan memahami komponen mana saja yang kritis; kemampuan untuk mengenal aktivitas kritis yang dilakukan agar dapat mengurutkan (breakdown) proses-proses aktivitas tersebut dalam beberapa komponen aktivitas.

- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan

Menguraikan dan menentukan standar untuk pelaksanaan kegiatan atau hasil yang ingin diperoleh dalam batasan-batasan tertentu dalam kegiatan tertentu.

4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

Pengukuran efek dan dampak sebuah program/kebijakan pada masyarakat sebelum dan sesudah program atau kegiatan itu dilaksanakan.

5) Menentukan apakah perubahan yang diamati

merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. Berkaitan dengan jumlah perubahan dan persentase peningkatan perubahan dari laksanakannya.

6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Merupakan dapat dilihat dari meningkatkan program, baiknya sikap masyarakat dan juga sikap pelaksana.

## 8. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nurgoho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan

ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Menurut Corry Enny Setyawati (2021:11) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut G.R Terry dalam Corry Enny Setyawati (2021:12) Pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan Menurut James A.F. Tones dalam Corry Enny Setyawati (2021:12 ) Pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982:124) mendefinisikan pengertian pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun Penelitian Terdahulu didalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama/Judul  | Hasil   | Perbedaan   |
|----|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   |
| 1. | Junaidi, Sugiannor, Dely Anhar.dkk , Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kapuas | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam indikator efektivitas kebijakan pengelolaan sampah perda kabupaten kapuas Nomor 3 Tahun 2019 dapat dikatakan belum optimal karena masih banyak sampah yang tertinggal di TPS diluar batas jam pembuangan. Indikator efesiensi cukup baik dengan retribusi yang dibayarkan masyarakat dibandingkan dengan keberhasilan lingkungan di Kota Kapuas. Indikator akurasi belum optimal dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah. Indikator pemerataan dalam hal partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat aktif dalam membayar retribusi dan pemerintah kabupaten kapuas dapat dikatakan merata dan fasilitas sanitasi juga merata diseluruh kota. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif.</li> <li>2. Lokasi penelitian peneliti terdahulu adalah di Kabupaten Kapuas, sementara penulis mengadakan penelitian adalah di Danau Maninjau Kabupaten Agam.</li> <li>3. Peneliti terdahulu menggunakan objek tentang pengelolaan sampah, sementara penulis menggunakan tentang pengelolaan pengendalian keramba jaring apung.</li> </ol> |
| 2. | Hartuti Purnaweni, Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah   | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan lingkungan di kawasan Kendeng Utara di kecamatan Sukolilo, Kebijakan pengelolaan kawasan karst di Kecamatan Sukolilo terwujud dalam peraturan menteri dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, terkait dengan karakteristik geografis; (2) Pengelolaan lingkungan memenuhi tiga unsur POAC (Planning, Organizing,Actuating).  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama Menggunakan deskriptif Kualitatif.</li> <li>2. Lokasi penelitian peneliti terdahulu adalah di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah, sementara penulis mengadakan penelitian di Danau Maninjau di Kabupaten Agam.</li> </ol>   |

| No | Nama/Judul   | Hasil   | Perbedaan  |
|----|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  |
| 3. | Agus Widodo, Mohammad Solekhan, Bambang Siswanto, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang               | Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang perlu adanya motifasi dan dedikasi yang tinggi dengan memberikan intensif untuk meningkatkan peranannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Motivasi yang dapat diberikan berupa penghargaan dan pemberian bantuan, bagi masyarakat yang telah menjaga lingkungan dengan baik, rapi dan bersih, sedangkan dedikasi dapat berupa penyuluhan dan pendidikan yang menyangkut masalah lingkungan; pemberian sanksi yang dapat berupa tegoran maupun denda bagi warga yang tidak mau menjaga pelestarian lingkungannya dan informasi yang tepat mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan di kota semarang.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan Deskriptif Kualitatif.</li> <li>2. Lokasi penelitian peneliti terdahulu adalah di kota semarang, sementara penulis mengadakan penelitian di Danau Maninjau di Kabupaten Agam.</li> <li>3. Peneliti terdahulu menggunakan variabel Peran, sementara peneliti menggunakan variabel evaluasi.</li> </ol>  |
| 4. | Herman, Lilis Suriani, Naya Farisha, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru | Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan teori input (masukan), Output (Keluaran), Outcome (hasil), Benefit (Manfaat), Impact (Dampak), belum terlaksana secara maksimal dikarenakan Dinas Perdagangan dan Penindustrian Kota Pekanbaru di bidang pengelolaan sampah dalam menyediakan sarana dan prasarana di pasar milik pemerintah kota pekanbaru belum terpenuhi secara keseluruhan. Oleh sebab itu mesti adanya ketersediaan buruh angkut sampah yang maksimal, kendaraan pengangkut sampah yang memadai, Tempat pembuangan sementara (TPS) permanen dan tidak permanen yang sesuai ukuran, kesadaran pedagang menjaga fasilitas sampah seperti gerobak sampah, tempat sampah dan lain sebagainya, serta kesadaran untuk membuang sampah tepat waktu dan pada fasilitas sampah yang telah disediakan. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan Deskriptif Kualitatif.</li> <li>2. Lokasi penelitian peneliti terdahulu adalah di kota pekanbaru, sementara penulis mengadakan penelitian di Danau Maninjau di Kabupaten Agam.</li> <li>3. Teori penelitian terdahulu menggunakan Akdon : Input (Masukan), Output (Keluaran), Outcome (Hasil), Benefit (Manfaat), Impact (Dampak), Sementara penulis menggunakan Teori Wiliam N Dunn : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Responktivitas, Ketetapan</li> </ol> |

| No | Nama/Judul   | Hasil   | Perbedaan  |
|----|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  |
| 5. | Herling A. Watania, Ellen Eva Poli, Erick Lobja, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Danau Tondano di Kabupaten Minahasa. | Partisipasi masyarakat di kecamatan Tondano pengganti disekitar danau, pembuatan terasing di pebukitan sekitar danau, pembuatan terasing di bukitan sekitaran danau, sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat sekitar danau, dan masyarakat sudah tidak lagi membuang sampah ke saluran air baik selokan, maupun sungai sehingga ekosistem danau tetap terjaga. Partisipasi lainnya adalah masyarakat setempat juga wajib memberikan informasi kepada pemerintah kecamatan atau desa, apabila ada masyarakat yang berupaya merusak hutan yang berada di sekitar danau serta masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah ke saluran air berupa selokan dan sungai, selain itu , peraturan pemerintahan tentang pelestarian Danau Tondano tetap diikuti oleh masyarakat setempat. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan Deskriptif Kualitatif</li> <li>2. Lokasi penelitian peneliti terdahulu adalah Danau Tondano di Kabupaten Minahasa, sementara penulis mengadakan penelitian di Danau Maninjau di Kabupaten Agam.</li> </ol> |

*Sumber: Modifikasi Penulis,2023*



### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait didalam variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini

**Gambar 2.1 Kerangka pemikiran penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat**



Sumber : Modifikasi Penulis, 2023

#### **D. Konsep Operasional**

Berdasarkan Konsep-konsep ini, peneliti akan memberikan pemahaman dalam menafsirkan istilah ataupun konsep :

1. Administrasi adalah Keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah suatu proses kegiatan, yaitu merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilakukan terus-menerus oleh menejer atau administrator, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengkoordinasikan apa yang telah direncanakannya sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengelolaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.
5. Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program.

6. Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yang di maksud yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu sendiri diturunkan dalam suatu program dan proyek.
7. Peraturan Daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
8. Pengendalian adalah suatu aktivitas membuat sesuatu agar terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan apa yang direncanakan untuk terjadi.
9. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut. Jadi pengelolaan itu sendiri merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin di capai.
10. Pelestarian adalah sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap abadi bersifat dinamis, luwes, dan selektif.
11. Efektivitas adalah suatu kegiatan yang menghasilkan keadaan yang berhasil dicapai sesuai dengan tujuan yang ingin ditetapkan sebelumnya.
12. Efisiensi adalah tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan yang telah dicapai berdasarkan ukuran biaya ataupun sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan.

13. Kecukupan adalah seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
14. Responsivitas adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
15. Ketepatan adalah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai/bermanfaat.



### E. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan pendeskripsian yang digunakan untuk mengukur suatu variabel tersebut, sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai beragam nilai-nilai

**Tabel 2. 2 Operasional Variabel penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.**

| Konsep  | Variabel   | Indikator       | Sub Indikator   |
|---|--|-----------------|---|
| 1   | 2  | 3               | 4   |
| Menurut Wiliam N. Dunn (2003: 608) Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. | Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat | Efektivitas     | a. Kecapaian Kebijakan<br>b. Tujuan Kebijakan                 |
|   |  | Efesiensi       | a. Hasil yang diinginkan<br>b. Seberapa usaha yang diperlukan |
|   |  | Kecukupan       | a. Pemecahan masalah<br>b. Hasil dan pemecahan masalah        |
|   |  | Responsitivitas | a. Nilai-nilai kebijakan<br>b. Kepuasan Masyarakat            |
|   |  | Ketepatan       | a. Hasil Kebijakan<br>b. Manfaat hasil kebijakan              |

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dan gejala-gejala secara tentang objek yang diteliti sehingga memperoleh suatu jawaban atau permasalahan yang dirumuskan yakni dengan tipe penelitian deskriptif dengan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore), dan menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Sukmadinata,2007:60).

Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi saat ini, didalamnya ada upaya menjelaskan, mencatat, dan menganalisis data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan meneliti kondisi objek yang

alamiah, yaitu penelitian sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. Alasan penulis melakukan penelitian ini bahwa kurangnya mekanisme dinas perikanan dan ketahanan pangan kabupaten agam dalam mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian pengelolaan Keramba Jaring Apung pada danau maninjau.

### **C. Key Informan dan Informan Penelitian**

Key informan menurut Moleong adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Meleong, 2010). Informan atau narasumber adalah orang yang dijadikan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian. Sedangkan menurut (Nazir 2005:55) Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Dimana Teknik Purposive Sampling ini adalah teknik penentuan sampel ataupun orang yang memiliki kekuasaan, pengetahuan serta yang mengetahui tentang apa yang akan diteliti.

**Tabel 3.1 Nama Key Informan dan Informan Penelitian**

| No | Jabatan  | Keterangan   | Jumlah  |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam | Key Informan | 1 Orang |
| 2. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam               | Informan     | 1 Orang |
| 3. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam           | Informan     | 1 Orang |
| 4. | Camat Tanjung Raya   | Informan     | 1 Orang |
| 5. | Pemilik KJA Danau Maninjau                                 | Informan     | 2 Orang |
| 6. | Masyarakat Sekitar Danau Maninjau                          | Informan     | 2 Orang |

Sumber : Data Olahan Penulis, 2023

#### **D. Teknik Penarikan Informan**

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah menggunakan Purposive Sampling. Maka menurut Sugiyono (2010 : 53-54), bahwa Purposive Sampling adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang-orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih tepat sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Dengan terkumpulnya beberapa informan dalam penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penarikan informan dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh



Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dimulai dari masyarakat sekitar danau maninjau selaku informan kecil kemudian membesar kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja , Camat Tanjung Raya, Pemilik KJA Danau Maninjau, Masyarakat Sekitar Danau Maninjau yang saling terkait satu sama lain dalam satu tujuan yaitu Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrument yang telah ditetapkan. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab-menjawab penelitian berkaitan dengan masalah penelitian yaitu:

Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang menyangkut pengamatan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan untuk masalah penelitian yang dianggap perlu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau

Maninjau, buku-buku, internet, Koran, Analisis Kebijakan Publik dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data informasi yang lengkap dan diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi terkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan :

1. Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 orang untuk bertukar informasi ataupun suatu ide dengan cara tanya jawab sehingga dapat disimpulkan atau makna dari topik tertentu yang dilakukan dengan responden yaitu kepala bidang pemulihan konservasi sumber daya alam.
2. Observasi adalah salah satu cara mengadakan suatu hal dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis. Untuk data-data yang diperoleh dalam observasi tersebut selanjutnya dicatat pada suatu catatan observasi dan pencatatan itu sendiri merupakan bagian dari pengamatan. Dari dalam penelitian ini melakukan observasi secara langsung untuk memperoleh tanggapan bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat observasi ini dilakukan oleh kepala dinas perikanan dan ketahanan pangan dan masyarakat yang tinggal didaerah sekitar kawasan danau maninjau.

3. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar berupa laporan serta keterangan yang mendapat mendukung penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengatur, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Sementara itu, bodgon & biklen dalam imam gunawan (2013:210) analisis data adalah proses pencarian dan mengatur secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Dengan demikian, pengumpulan data dengan wawancara dan obeservasi melalui teknik analisis data tersebut.

#### **1. Reduksi data**

Dari teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, maupun dokumentasi) telah ditentukan banyak data, kompleks dan campur aduk, maka peneliti mereduksi data. Dalam mereduksi data, peneliti memilih dan memilah data yang penting dianggap relevan dengan penelitian untuk disajikan. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2014:247)

## 2. Sajian Data

Sajian data Merupakan rangkaian informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan sajian data dapat diketahui apa yang terjadi akan dikemungkinan untuk menganalisa dan mengambil tindakan lain.

## 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari sajian data yang tersusun selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan akhir. Tiga komponen diatas akan berinteraksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam penelitian ini, penulis tetap berada dalam lingkungan interaksi tersebut sampai pengumpulan data bergerak ke reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengatur, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengkatagorikannya sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

**Tabel 3. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian**

| No | Jenis Kegiatan  | Bulan dan Minggu ke 2023 |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
|----|---|--------------------------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|--|
|    |   | Juni                     |   |   |   | Juli |   |   |   | Agustus |   |   |   | September |   |   |   | Oktober |   |   |   |  |
|    |   | 1                        | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |  |
| 1  | Persiapan dan penyusunan UP                             |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 2  | Seminar UP  |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 3  | Revisi UP   |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 4  | Revisi kusioner   |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 5  | Survay/Penelitian Lapangan                              |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 6  | Survay Lapangan   |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 7  | Analisis data/pengolahan data                           |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 8  | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian/bimbingan (Skripsi) |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 9  | Konsultasi Revisi Skripsi                               |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 10 | Ujian Konferehensif Skripsi                             |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 11 | Revisi Skripsi  |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |
| 12 | Penggandaan Skripsi                                     |                          |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |  |

Sumber: Modifikasi Penulis,2023

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, provinsi Sumatera Tengah di pecah menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Wilayah kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci digabungkan dengan provinsi Jambi sebagai kabupaten sendiri. Begitu pula dengan Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan masuk ke dalam provinsi Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958 ibu kota provinsi Sumatera Barat dipindahkan ke Padang.

Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan Gunung Kerinci di kabupaten Solok Selatan dan provinsi Jambi sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085 m. Selain Gunung Kerinci, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Selain gunung, Sumatera Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar, disusul Danau Maninjau di kabupaten Agam. Dengan luas mencapai 130,1 km<sup>2</sup>, Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan kesebelas di

Indonesia. Danau lainnya terdapat di kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan dari Danau Di atas dan Danau Dibawah).

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yaitu antara 22.6 °C sampai 31.5 °C. Provinsi Sumatera Barat juga dilalui oleh Garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur Sumatera seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, provinsi Sumatera Barat memiliki luas 42.297,30 km<sup>2</sup> yang artinya setara dengan 2.17% luas dari Indonesia. Dari luas tersebut lebih dari 40.17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Provinsi Sumatera Barat diapit oleh beberapa provinsi tetangga sebagai batasannya. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, bagian barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, selatan berbatasan dengan provinsi Bengkulu dan sebelah timur berbatasan dengan provinsi Riau dan Jambi.

## **B. Gambaran Umum Kabupaten Agam**

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang

terdiri dari tiga kewedanaan masing-masing Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu. Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi. Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam. Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

Secara geografis, Kabupaten Agam berada pada pada 000 01' 34" – 000 28' 43" LS dan 990 46' 39" – 1000 32' 50" BT. Kabupaten Agam terletak pada kawasan yang sangat strategis, dimana dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Barat Sumatera dan dilalui oleh Fider Road yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian. Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering dan hortikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi,



gerakan tanah/longsor dan gempa serta letusan gunung berapi. Demikian juga terhadap pemenuhan berbagai infrastruktur yang masih terbatas.

Kabupaten Agam mempunyai kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah, dengan ketinggian berkisar antara 0 - 2.891 meter dari permukaan laut. Menurut kondisi fisiografinya, ketinggian atau elevasi wilayah Kabupaten Agam, bervariasi antara 2 meter sampai 1.031 meter dpl. Formasi batuan yang dijumpai pada daerah Kabupaten Agam dapat digolongkan kepada Pra Tersier, Tersier, dan Kuartar yang terdiri dari batuan endapan permukaan, sedimen, metamorfik, vulkanik dan intrusi. Batuan vulkanik terdapat di Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Danau Maninjau.

### **C. Gambaran Umum Danau Maninjau**

#### **1. Gambaran**

Danau Maninjau adalah sebuah danau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Danau Maninjau merupakan danau vulkanik yang berada di ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut yang memiliki panjang sekitar 16 km, lebar 8 km, luas 9.950 ha serta kedalaman 157 m (BPS Agam, 2017). Danau Maninjau merupakan salah satu danau terpopuler berikut dengan keindahan alam dan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Kawasan Danau Maninjau merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Agam. Kegiatan perekonomian unggulan di kecamatan ini terletak pada sektor dan subsektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, serta pariwisata.

Selain untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Danau Maninjau juga digunakan sebagai tempat budidaya perikanan darat. Guna menunjang kehidupan ekonomi masyarakat, masyarakat daerah sekitar danau bersama pemerintah setempat bisa memanfaatkan danau sebagai lahan pembudidayaan perikanan darat, yaitu dengan menggunakan sistem keramba jaring apung (KJA) namun di Maninjau orang biasa menyebut dengan istilah keramba.

Keramba adalah keranjang atau kotak segi empat yang digunakan untuk membudidayakan ikan dengan bahan kerangka kayu, besi, bambu, dan pelampung drum atau bahan lain menggunakan jaring dengan ukuran tertentu. Keramba pada 2 umumnya ditempatkan di sungai sehingga air sungai dapat mengalir melewati keramba dan air di dalam keramba senantiasa bersikulasi mengikuti arus air. Keramba dapat ditempatkan tenggelam maupun mengapung sebagian, dan masing-masing dilakukan sesuai kebutuhan. Di perairan yang luas dan dalam, keramba ditempatkan mengapung sebagian dengan bantuan pelampung. Salah satu varian keramba yaitu keramba jaring apung yang ditempatkan di laut. Keramba jaring apung terdiri dari rangka dengan pijakan untuk inspeksi dan menggunakan pelampung agar tetap mengapung, serta tertambat pada rangka dan jangkar sehingga tidak berpindah dari posisinya. Ikan tetap berada di dalam keramba karena terkurung oleh jaring.

## 2. Karakteristik Danau Maninjau

Danau Maninjau secara geografis terletak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Nagari-Nagari (Desa) yang mempunyai tepian danau Maninjau adalah Maninjau, Sungai Batang dan Bayur (disebut Nagari IV Koto). Kotobaru, Tanjung Batung/Koto Tinggi, Paninjauan, Koto Kaciek, Koto Gadang, Koto Malintang (disebut dengan Nagari VI Koto). Danau Maninjau berada pada posisi geografis 0o12'26,63" LS - 0o25'02,80" LS dan 100o07'43,74" BT - 100o16'22,48" BT, berada pada ketinggian 461,50 m di atas permukaan laut.

**Tabel 4. 1 Karakteristik Danau Maninjau**

| Parameter                             | Satuan          | Nilai  |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| Luas Permukaan                        | Km              | 99,96  |
| Panjang garis pantai                  | Km              | 52,7   |
| Panjang maksimum                      | Km              | 16,46  |
| Lebar maksimum                        | Km              | 7,50   |
| Kedalaman maksimum                    | M               | 168    |
| Kedalaman rata-rata                   | M               | 105    |
| Kedalaman relatif (Zr)                | -               | 1,508  |
| volume air                            | km <sup>3</sup> | 10,33  |
| Pengembangan garis pantai             | (D)             | 1,51   |
| Luas Daerah Tangkapan Air             | Ha              | 13.260 |
| Rasio luas DTA : luas permukaan danau | -               | 1:1,32 |

**Gambar 4.1 Danau Maninjau**



*Sumber : Koransulindo.com*

#### **D. Struktur Organisasi**

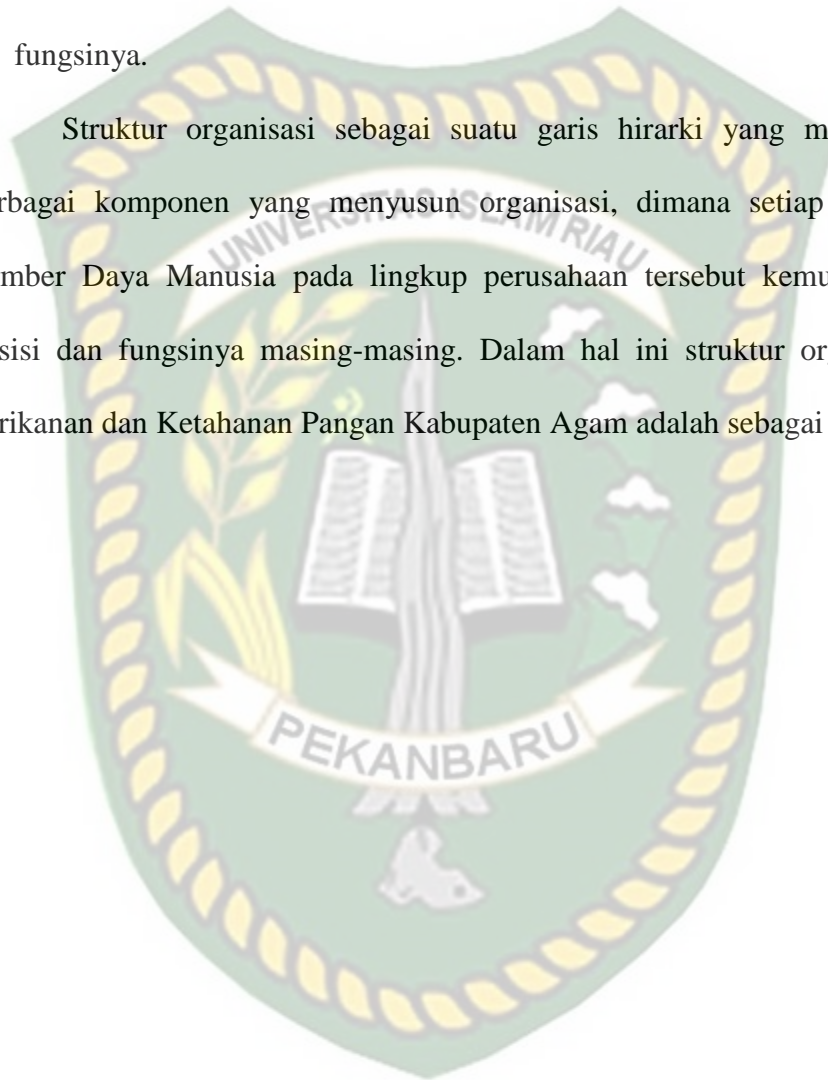
Berdasarkan Peraturan Bupati Agam 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perikanan dan Pangan.

Dalam Penyelenggaraan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

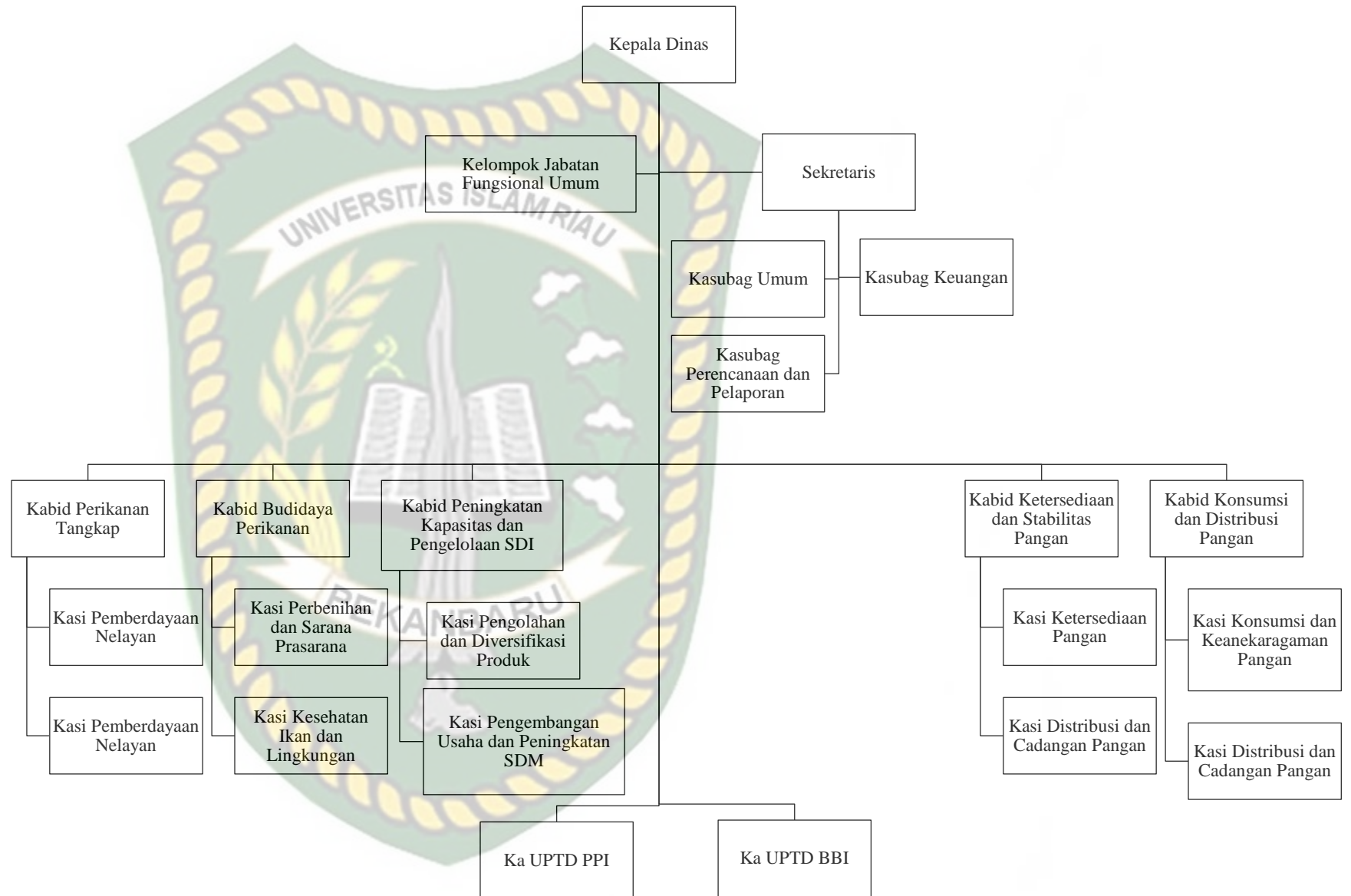
- Perumusan kebijakan di bidang perikanan dan bidang pangan
- Perumusan kebijakan di bidang perikanan dan bidang Pangan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan bidang Pangan

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan bidang Pangan
- Pelaksanaan administrasi Dinas
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun organisasi, dimana setiap individu atau Sumber Daya Manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini struktur organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam adalah sebagai berikut



Gambar 4.2 :Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian informan yang terdapat dipenelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Sebelum masuk kepada pokok hasil penelitian dan pembahasan penelitian memaparkan identitas informan sebagai sumber dalam memperoleh data dan informasi. Informan sangat penting dijelaskan didalam sebuah penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah asli dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karna sebuah penelitian yang jelas harus sesuai dengan pokok penelitiannya.

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, pendidikan dan usia informan.

#### 1. Jenis Kelamin Informan

Pada data informan menurut jenis kelamin perlu di jelaskan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian khususnya dalam mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 identitas informan berdasarkan jenis kelamin**

| No            | Jenis kelamin | Jumlah   | Peresentase |
|---------------|---------------|----------|-------------|
| 1.            | Laki-laki     | 6        | 75%         |
| 2.            | Perempuan     | 2        | 25%         |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>8</b> | <b>100%</b> |

Sumber : Modifikasi Penulis,2023

Pada tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah laki-laki sebanyak 6 orang dengan peresentase 75% dan jumlah perempuan sebanyak 2 orang dengan peresentase 25% berdasarkan data tersebut jumlah informan didominasi oleh laki-laki.

## 2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis tingkat pendidikan seseorang sedikit banyak mempengaruhi pola pikir, bersikap dan wawasan atau pengetahuan yang telah dimilikinya. Wawasan yang didapat pada saat menemuh pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian dilapangan dengan melibatkan beberapa unsur maka informan berasarkan pendidikan terahir dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.2 identitas informan berdasarkan tingkat pendidikan**

| No            | Pendidikan terahir | Jumlah   | Peresentase |
|---------------|--------------------|----------|-------------|
| 1.            | SMP                | 2        | 25%         |
| 2.            | SMA                | 2        | 25%         |
| 3.            | D4-S1              | 2        | 25%         |
| 4.            | S2                 | 2        | 25%         |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>8</b> | <b>100%</b> |

Sumber : Modifikasi Penulis,2023

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa informan yang memiliki jenjang sekolah SMP 2 orang dengan persentase 25%, informan yang memiliki jenjang pendidikan SMA berjumlah 2 orang dengan peresentase 25%, informan dengan jenjang pendidikan S1 berjumlah 2 orang dengan peresentase 25% dan



informan yang memiliki jenjang pendidikan S2 berjumlah 2 orang dengan peresentase 25%.

### 3. Tingkat Umur Informan

Faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang salah satunya merupakan umur. Umur mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugas-tugas yang di berikan selain itu juga umur sangat mempengaruhi ketelitian seseorang dan mempengaruhi setiap aktifitas dalam hidupnya dikarenakan umur di jadikan indikator penentuan produktifitas atau tidaknya seseorang. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat di jelaskan melalui tabel berikut ini :

**Tabel 5.3 Identitas informan berdasarkan tingkat usia**

| No            | Tingkat umur | Jumlah   | Peresentase |
|---------------|--------------|----------|-------------|
| 1.            | 36-45        | 2        | 25%         |
| 2.            | 46-60        | 6        | 75%         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>8</b> | <b>100%</b> |

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2023*

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa usia informan antara 36-45 berjumlah 2 orang dengan persentase 25% dan jumlah usia informan antara 46-60 berjumlah 6 orang dengan persentase 75%.

### **B. Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.**

Danau Maninjau merupakan ekosistem yang sangat unik di muka bumi dan sering disebut sebagai “ginjal bumi” karena perannya sangat penting dalam pengentasan polusi air yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Fungsi danau Maninjau tidak hanya menyediakan sumber bahan makanan, bahan baku, sumber air bagi umat manusia dan pembangkit listrik tenaga air. Tetapi juga menjaga

keseimbangan ekologis, keanekaragaman hayati dan spesies langka. Area budidaya ikan dengan keramba jaring apung. Selain itu, danau Maninjau memegang peranan penting dalam konservasi air, pengendalian banjir dan kekeringan, degradasi dari polusi, mengatur dan menjaga perubahan iklim, dan sumber air bawah tanah untuk kehidupan.

Sumber air danau Maninjau lebih dominan berasal dari air bawah tanah. Tidak ada sungai besar yang mengalirkan air sepanjang tahun ke danau. Volume air danau 10,33 km<sup>3</sup>. Air danau secara alami mengalir ke sungai Antokan yang bermuara ke samudera Hindia di pantai barat Provinsi Sumatera Barat. Semenjak tahun 1983 air danau Maninjau dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA Maninjau). Memproduksi energi listrik dengan frekuensi 50 Hz, tegangan 10 KV dan menghasilkan daya 4 x 17 MW. Lokasi Pusat Pembangkit Listrik (*Power House*) dan bangunan pengontrol berada di sekitar Jorong Lubuk Sao, Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Danau Maninjau dengan luas permukaan air 99.5 km<sup>2</sup>, di dalamnya hidup berbagai jenis ikan. Sejak dahulu kala sudah dimanfaatkan sebagai sumber pangan oleh masyarakat setempat. Spesies ikan yang terkenal adalah rinuk dan pensi. Semenjak tahun 1992 telah dimanfaatkan sebagai areal budidaya ikan dengan keramba jaring apung (KJA). Usaha ini sampai saat sekarang masih bertahan dan eksis. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh petani ikan.

Di danau Maninjau hidup sebanyak 16 species ikan, terdiri dari ikan asli dan ikan introduksi yang disengaja maupun yang tidak disengaja ditebarkan ke danau ini. Berdasarkan tropik level makanan ikan yang hidup di Danau Maninjau

terdiri atas herbivora, omnivor dan karnivor. Satu species yang beruaya antara air tawar (danau Maninjau - sungai Antokan - ke laut) adalah ikan sidat.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan keramba jaring apung (KJA) sebagai salah satu budidaya yang ada di kawasan Danau Maninjau menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pengelolaan KJA pada Danau Maninjau dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Agam yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Camat Tanjung Raya, Satpol pp, Pemilik KJA dan masyarakat sekitar kawasan Danau Maninjau.

Budidaya ikan dengan keramba jaring apung di danau Maninjau adalah salah satu sumber mata pencarian masyarakat di selingkar danau. Dahulu kala masyarakat berusaha di lahan sawah dan kebun yang ada di selingkar danau. Selain itu masyarakat juga membangun obyek-obyek wisata yang mengundang banyak pelancong dari berbagai mancanegara. Budidaya ikan KJA mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar, maka jumlah KJA bertambah setiap tahun.

Keputusan Bupati Agam Nomor 263 tahun 2021 tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau instansi berada pada unit penanggulangan sedimen, unit dampak berkurang/punahnya biota endemik danau, unit regulasi dan pentaan kelembagaan dan sekretariat tim terpadu penyelamatan danau maninjau. Pengendalian Keramba jaring apung terletak pada unit dampak berkurang/punahnya biota endemik danau.

Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk kelestarian kawasan Danau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemulihan, pelestarian, mitigasi, pengendalian dan pengawasan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk merubah ekosistemnya, dapat mengakibatkan terjadinya perusakan lingkungan baik dampaknya dirasakan sekarang maupun dimasa yang akan datang termasuk dalam pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tentang pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ,Dinas Lingkungan Hidup, Camat Tanjung Raya, Satpol PP Kabupaten Agam dan juga Pemilik KJA serta masyarakat sekitar kawasan Danau Maninjau. Peran dari masing-masing pihak telah dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan dan Kebijakan daerah yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan harus dilakukan evaluasi. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan lancar dan tujuan tercapai secara optimal. Berbagai bidang kehidupan manusia membutuhkan penilaian untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Data dan informasi yang akurat diperlukan untuk membuat penilaian untuk mengambil keputusan. Kegiatan

evaluasi sering dilakukan dalam organisasi, perusahaan, atau komunitas tertentu setelah menyelesaikan sebuah kegiatan untuk meningkatkan kualitas.

Evaluasi juga dilakukan terhadap pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam yang diklasifikasikan menjadi 5 kategori yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut tentang evaluasi yang dilakukan oleh informan penelitian.

### **1. Efektivitas**

Efektifitas dapat dilihat dari pencapaian kebijakan dan tujuan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam. Pencapaian kebijakan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan didapatkan sebagai berikut.

*"Jika dilihat tercapai atau tidak nya kebijakan yang dilakukan dapat dikatakan belum tercapai. Hal ini dilihat pada jumlah KJA yang tidak sesuai perda. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2022 yang menyebutkan didalam perda akan diperbolehkan 6000 petak KJA sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 sudah melebihi batas perda tersebut. Hal ini menunjukkan masih belum tercapai nya indikator kinerja." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 09.10 WIB)*

Tujuan kebijakan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau oleh pemerintahan daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat disampaikan oleh Pak Doni yaitu :

*"Tujuan kebijakan pada dasarnya selaras dengan tujuan pengelolaan kawasan danau yaitu untuk mewujudkan kawasan danau yang bersih, lestari, berbudaya dan berkelanjutan." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 09.40 WIB)*

Begitu juga dengan pencapaian kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan oleh Pak Jafrizal yaitu :

*"Kecapaian kebijakan dapat dilihat dari pencapaian kinerja pada pengelolaan danau maninjau. Dalam hal ini indikator pencemaran danau yang dapat dikatakan belum tercapai karena jumlah KJA yang ada melebihi KJA yang atur dalam perda sehingga Danau Maninjau dapat dikatakan tidak lestari." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 13.00 WIB)*

Tujuan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan oleh Pak Jafrizal sebagai berikut.

*"Tujuan dari kebijakan pengendalian keramba jaring apung tersebut adalah untuk mewujudkan Danau Maninjau yang kembali lestari dan keadannya yang membaik, bersih, dan tidak tercemar lagi hanya dari segi pemanfaatan Danau Maninjau ataupun kondisi Danau Maninjau yang harus lestari seperti dahulu kembali, namun juga harus diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat yang memanfaatkannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kegunaan danau di masa yang akan datang". (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 13.05 WIB)*

Untuk pencapaian kebijakan pemerintah terhadap Pemilik KJA dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Pak Hendry Pemilik KJA yaitu:

*"Kecapaian kebijakan pemerintah dimana semua pemilik KJA tidak selalu mengikuti aturan, karena yang diizinkan pemerintah KJA hanya sedikit sedangkan kami butuh untuk mata pencaharian." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 09.00 WIB)*

Tujuan kebijakan pemerintah terhadap Pemilik KJA dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau dijabarkan oleh Pak Hendry sebagai berikut.

*"Pada dasarnya tercapainya kawasan danau maninjau yang aman dan lestari termasuk dalam keramba jaring apung, namun sulit untuk*

*mencapai tujuan tersebut karena KJA ini merupakan mata pencaharian kami." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 09.05 WIB)*

Bagaimana kecapaian kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Pak Ade yaitu :

*"Kecapaian kebijakan dapat dilihat melalui pencapaian pengawasan dan penindakan, pelanggaran terhadap regulasi terkait pengelolaan danau. Kecapaian kebijakan tersebut dikatakan belum bisa tercapai dikarenakan zonasi belum ditentukan, maka pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh kabupaten juga belum bisa kami jalankan secara maksimal, kami menunggu penetapan zonasi pada Danau Maninjau baru bisa melaksanakan perda yang telah ditetapkan. (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.00 WIB)*

Selanjutnya tujuan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan oleh Pak Ade sebagai berikut

*"Tujuan kebijakan yaitu mewujudkan kawasan danau yang bersih, lestari, berbudaya dan berkelanjutan dengan menciptakan kondisi Danau Maninjau yang bersih berdasarkan sudah ada diatur standar atau kriteria yang harus dipenuhi oleh Danau Maninjau untuk menjadi danau yang kembali lestari." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.00 WIB)*

Kecapaian kebijakan Camat Tanjung Raya dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau dalam wawancara dengan peneliti disampaikan sebagai berikut.

*"Untuk capaian kebijakan dapat dilihat dari indikator pengembangan dan penerapan publikasi dan sistem informasi terpadu terkait pengendalian pencemaran danau. Pada indikator ini Kecamatan Tanjung Raya telah melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan hasilnya masyarakat memahami hal tersebut." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 13.00 WIB)*

Berkaitan dengan tujuan kebijakan Camat Tanjung Raya dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau Ibu Roza menyampaikan pendapat berikut.

*"Tujuan kebijakan disesuaikan dengan tujuan pengelolaan kawasan."  
(Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 13.05 WIB)*

Untuk kecapaian kebijakan pemerintah menurut Masyarakat sekitar Danau Maninjau dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disebutkan oleh Pak Joni yakni :

*"Kecapaian kebijakan dalam pengendalian keramba jaring apung belum terlaksanakan dengan baik karna pemilik KJA tidak mematuhi peraturan tersebut sehingga danau maninjau menjadi kotor, bau dikarenakan sisa pakan ikan menumpuk dikawasan danau. (Wawancara: Selasa 11 -Juli-2023, Pukul 13.00 WIB)*

Selain kecapaian, tujuan kebijakan pemerintah dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Masyarakat sekitar Danau Maninjau berdasarkan wawancara dengan Pak Joni yaitu :

*"Tujuannya agar kawasan tersebut bersih, lestari, berbudaya dan berkelanjutan." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 13.03 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa efektivitas evaluasi kegiatan dilihat dari kecapaian dan tujuan kebijakan. Efektivitas dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dikatakan belum efektif karena capaian kebijakannya belum mencapai target yang diharapkan menurut Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2022 yang menyebutkan didalam perda akan diperbolehkan 6000 petak KJA. Jika dilihat pada realisasinya pada tahun 2021 dan 2022 jumlah KJA melebihi target yang sudah ditetapkan berdasarkan batas perda tersebut. Meskipun



kebijakannya telah memiliki tujuan yang jelas namun pada dasarnya Danau Maninjau merupakan salah satu bentuk mata pencaharian masyarakat sehingga sulit mengikuti aturan yang ditetapkan dan kebijakan tersebut belum bisa dijalankan karena belum adanya peraturan zonasi dari pemerintah. Pemerintah daerah telah mengupayakan solusi berdasarkan kelebihan keramba jaring apung melalui advokasi kepada pemilik keramba jaring apung. Hal ini diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada pemilik keramba untuk tetap melakukan kegiatan mata pencahariannya namun tetap menjaga kelestarian danau Maninjau.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Junaidi, Sugiannor, Dely Anhar.dkk yang menunjukkan bahwa dalam indikator efektivitas kebijakan dapat dikatakan belum optimal karena masih banyak sampah yang tertinggal di TPS diluar batas jam pembuangan. Indikator akurasi belum optimal dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah. Indikator pemerataan dalam hal partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat aktif dalam membayar retribusi dan pemerintah kabupaten kapuas dapat dikatakan merata dan fasilitas sanitasi juga merata diseluruh kota.

## **2. Efisiensi**

Efisiensi dikelompokkan menjadi hasil yang diinginkan dan upaya yang diperlukan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam. Hasil yang diinginkan Pak Jafrizal didapatkan sebagai berikut.

*"Hasil yang diinginkan tentu saja disesuaikan dengan hasil yang diinginkan pemerintahan yakni mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat secara seimbang." ."* (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 13.10 WIB)

Hasil yang diinginkan juga dijabarkan oleh Camat Tanjung Raya yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

*"Hasil yang diinginkan tentu saja berkaitan dengan pencapaian kinerja, dimana kami dapat mengkoordinir pengembangan dan penerapan publikasi dan sistem informasi terkait pengendalian pencemaran danau." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 13.10 WIB)*

Hasil yang diinginkan Satpol PP Pak Ade dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau dijabarkan dalam hasil wawancara sebagai berikut.

*"Hasil yang diinginkan oleh instansi yaitu mempertahankan kualitas dan kuantitas sumber daya alam kawasan danau maninjau." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.10 WIB)*

Terhadap hasil yang diinginkan tentu saja diperlukan upaya yang diperlukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau. Menurut Camat Tanjung Raya Ibu Roza upayanya adalah:

*"Upaya yang diperlukan adalah bagaimana dapat melakukan advokasi pada semua wilayah yang mengelola danau maninjau." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 13.15 WIB)*

Selain hasil yang diinginkan, seberapa besar upaya yang diperlukan juga disampaikan oleh Pak Jafrizal selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

*"Usaha yang sedang di upayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah membentuk tim khusus yang melakukan pengawasan pada kawasan danau maninjau dengan jadwal yang tersusun dan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat mengawasi KJA." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 13.10 WIB)*

Upaya yang dirasa perlu oleh Camat Tanjung Raya dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau adalah :

*"Upaya yang diperlukan adalah bagaimana dapat melakukan advokasi pada semua wilayah yang mengelola danau maninjau." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 13.23 WIB)*

Hasil wawancara ini sejalan dengan wawancara dengan Satpol PP Pak Ade tentang bagaimana cara mendapatkan hasil yang diinginkan dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau yaitu:

*"Upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan adalah adanya kegiatan khusus yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan sehingga Satpol PP dapat melakukan pengewasan dengan berkoordinasi dengan masyarakat." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.20 WIB)*

Berkaitan dengan hasil yang diinginkan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Pak Doni adalah :

*"Hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan danau maninjau yakni penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 10.15 WIB)*

Seberapa usaha yang diperlukan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan oleh Pak Doni sebagai berikut.

*"Jika dilihat dari pencapaian indikator dan target kinerja masih di bawah angka 50%. Namun program tetap dijalankan dengan harapan akan ada peningkatan atau pemerintah membuat perda baru dengan adanya." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 10.20 WIB)*

Hasil yang diinginkan pemerintah dan Pemilik KJA dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan oleh Pak Hendri yakni :

*"Hasil yang diinginkan pastinya danau maninjau menjadi salah satu danau yang tidak tercemar dan mensejahterakan masyarakat." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 09.05 WIB)*

Untuk usaha yang diperlukan pemerintah dan Pemilik KJA dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Pak Hendri yaitu :

*"Upaya yang diperlukan seperti menambah keramba jaring apung dan prasarana yang mendukung lainnya." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 09.08 WIB)*

Untuk hasil yang diinginkan pemerintah berdasarkan pengamatan Masyarakat sekitar Danau Maninjau dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Pak Joni yakni :

*"Hasil yang diinginkan adalah danau maninjau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui karamba jaring apung." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 13.20 WIB)*

Bentuk usaha yang diperlukan pemerintah dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau berdasarkan pengamatan Masyarakat sekitar Danau Maninjau berdasarkan wawancara peneliti dengan Pak Joni adalah sebagai berikut.

*"Upaya yang dilakukan berupa adanya penambahan armada dalam pengadaan keramba jaring apung." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 13.20 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa efisiensi evaluasi kegiatan dilihat dari hasil yang diinginkan dan upaya untuk mencapainya. Efisiensi dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dikatakan belum efisien karena hasil yang diinginkan belum sesuai dengan indikator kinerja dimana target yang diinginkan adalah seluruh keramba jaring apung dapat dikelola oleh pemerintah daerah.

Namun pada kenyataannya pengelolaan keramba jaring apung oleh pemerintah hanya mencapai 50%. Pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi belum tercapainya indikator kinerja ini yakni berupa upaya advokasi, sosialisasi, koordinasi dan pembentukan tim khusus. Kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti advokasi biasanya dilakukan dengan melibatkan lintas sektoral dan masyarakat.

Penelitian oleh Wanti (2022) yang menunjukkan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe, harus memenuhi kriteria penilaian kebijakan diantaranya efisiensi. Efisiensi menunjukkan usaha yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kebijakan, kecukupan menyangkut pengaruh hasil kebijakan terhadap masalah yang terjadi.

### **3. Kecukupan**

Kecukupan dapat dilihat dari pemecahan masalah dan hasil dari pemecahan masalah tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam. Kecukupan dalam evaluasi pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau oleh Camat Tanjung Raya Ibu Roza didapatkan sebagai berikut.

*"Pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan lintas sektor dengan adanya KJA ramah lingkungan ini akan membuat kelestarian Danau maninjau tidak berkurang dan tidak menghilangkan mata pencarian masyarakat sebagai petani KJA. Jika masyarakat mengerti apa guna KJA ramah lingkungan ini akan membuat Danau maninjau tidak tercemar seperti saat ini. (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 13.27 WIB)*

Pemecahan masalah pemerintah dan Pemilik KJA dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan oleh Pemilik KJA sebagai pihak terlibat langsung dalam pengelolaan KJA pada Danau Maninjau oleh Bapak Hendri yakni:

*"Pemecahan masalah biasanya kami bermusyawarah dengan pemerintah namun belum menemukan solusi tentang KJA ini." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 09.10 WIB)*

Masyarakat sekitar kawasan Danau Maninjau menjabarkan bagaimana pemecahan masalah pemerintah dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau berdasarkan pengamatan Masyarakat sekitar Danau Maninjau oleh Bapak Joni yaitu :

*"Pemecahan masalah nya saya rasa kembalikan kepada pemerintah dan pemilik KJA. Kami sebagai masyarakat merasa tercemar. Danau menjadi kotor karena KJA ini." ." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 13.30 WIB)*

Hasil dari pemecahan masalah dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau oleh Camat Tanjung Raya Ibu Roza disampaikan sebagai berikut.

*"Hasil dari pemecahan masalahnya adalah berupa hasil diskusi yang akan di usulkan melalui penganggaran pada tahun berikutnya. Kami telah berusaha melakukan advokasi namun pemilik KJA masih belum mentaati." ." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 13.30 WIB)*

Hasil dari pemecahan masalah dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau oleh Satuan pemerintah dan Pemilik KJA juga disampaikan oleh Pemilik KJA pada kawasan Danau Maninjau oleh Bapak Hendri yakni :

*"Hasil dari pemecahan masalah tersebut akan di usulkan dan dipertimbangkan, jika memungkinkan akan diwujudkan. Namun sampai saat ini belum ada jalan keluarnya." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 09.13 WIB)*

Bagaimana hasil dari pemecahan masalah dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau oleh pemerintah berdasarkan pengamatan Masyarakat sekitar Danau Maninjau dijabarkan oleh Masyarakat sekitar kawasan Danau Maninjau oleh Bapak Joni yaitu :

*"Hasilnya keramba jaring apung semakin banyak diminati sehingga jumlah meningkat harusnya diiringi juga dengan kelestarian danau." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 13.30 WIB)*

Pemecahan masalah pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Pak Doni yakni :

*"Pemecahan masalah dilakukan dengan musyawarah, forum diskusi, meeting internal maupun eksternal dengan koordinasi dan melibatkan pihak lintas sektoral." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 10.25 WIB)*

Hasil dari pemecahan masalah dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan disampaikan Pak Doni yaitu :

*"Hasil dari pemecahan masalah di dapatkan dalam bentuk hasil diskusi, kemudian dilakukan rencana tidak lanjut hingga pengusulan kegiatan." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 10.30 WIB)*

Bagaimana pemecahan masalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Pak Jafrizal yakni :

*"Pemecahan masalah pada Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintahan Kabupaten Agam lainnya untuk*

*bersama-sama melakukan pengawasan secara berkala dan rutin." ."*  
(Wawancara: Senn 10-Juli-2023, Pukul 13.15 WIB)

Hasil dari pemecahan masalah dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam disampaikan oleh Pak Jafrizal yaitu :

*"Hasil dari pemecahan masalah tersebut diharapkan dapat menjadi realisasi kegiatan yang terwujud dalam rencana kegiatan." ."*  
(Wawancara: Senn 10-Juli-2023, Pukul 13.20 WIB)

Selanjutnya pemecahan masalah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau berdasarkan wawancara dengan Pak Ade yaitu :

*"Pemecahan masalah pada Satpol PP terhadap pengelolaan keramba dilakukan melalui rapat internal." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.30 WIB)*

Untuk hasil dari pemecahan masalah dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau oleh Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pak Ade yakni :

*"Hasil dari pemecahan masalah akan di sosialisasikan kepada satuan." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kecukupan evaluasi kegiatan dilihat dari pemecahan masalah dan hasil dari pemecahan masalah. Evaluasi dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dikatakan belum dikatakan cukup karena kegiatan yang dilakukan belum membantu memecahkan masalah seperti musyawarah, forum diskusi, koordinasi antara pemerintah dan lintas sektoral. Pelaksanaan kegiatan sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah



Kabupaten Agam namun belum cukup dalam menjaga kelestarian kelestarian danau Maninjau. Hal ini terlihat dari kegiatan koordinasi yang telah dilakukan dimana belum ditindaklanjuti oleh pihak lainnya. Selain itu kegiatan yang dilakukan seperti musyawarah atau diskusi tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil dari pemecahan masalah tersebut belum menunjukkan tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi kegiatan.

Penelitian Asnil dkk (2017) menunjukkan pengelolaan danau Maninjau belum cukup dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Tujuan yang ingin dicapai untuk melestarikan fungsi SDAL dalam pemanfaatan Danau Maninjau adalah pemahaman nilai-nilai yang dimiliki danau kepada masyarakat, terpeliharanya keanekaragaman hayati, terpeliharanya fungsi hidrologi dan ekologi, Penyesuaian tataletak dan rasionalisasi KJA, terjaganya debit air danau, memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan perikanan yang baik bersama masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat danau, terpeliharanya kualitas perairan danau, penegakan regulasi pemerintah. Terlaksananya koordinasi kelembagaan antar instansi terkait.

#### **4. Responsivitas**

Responsivitas dikategorikan dari nilai-nilai kebijakan dan kepuasan masyarakat yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam. Nilai-nilai kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Pak Ade didapatkan sebagai berikut.

*"Nilai kebijakan yaitu adanya asas kelestarian, kehati-hatian, keadilan dan partisipasi." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.33 WIB)*

Penerapan nilai-nilai kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Jafrizal yaitu :

*"Nilai kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup disesuaikan dengan asas pengelolaan yaitu pelestarian dan keberlanjutan serta keserasian dan keseimbangan." (Wawancara: Senn 10-Juli-2023, Pukul 13.25 WIB)*

Dalam penerapan nilai-nilai kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Agam dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau dijabarkan oleh Pak Doni yakni :

*"Nilai kebijakan di sesuaikan dengan visi Dinas Perikanan yakni terwujudnya Kabupaten Agam yang berkeadilan, inovatif, sejahtera, agamais dan mandiri." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 10.35 WIB)*

Untuk kepuasan masyarakat dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disampaikan oleh Pak Ade sebagai Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam yakni :

*"Belum dilakukan survey kepuasan masyarakat secara formal namun berdasarkan keluhan masyarakat banyak yang mengeluhkan danau menjadi kotor karena KJA." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.35 WIB)*

Bagaimana kepuasan masyarakat dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam disampaikan Pak Jafrizal sebagai berikut.

*"Untuk kepuasan masyarakat sendiri belum dilakukan survey terhadap kinerja namun dilapangan menyatakan masyarakat tidak suka dengan danau yang tidak bersih." (Wawancara: Senn 10-Juli-2023, Pukul 13.30 WIB)*

Pendapat yang sama oleh Pak Doni kepuasan masyarakat dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau terhadap kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Agam

*"Untuk kepuasan masyarakat sendiri belum dilakukan survey terhadap kinerja. Tapi kita juga turun lapangan dan mendapati masyarakat yang diwawancara sering mengeluhkan masalah kebersihan dan kelestarian danau"* (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 10.40 WIB)

Nilai-nilai kebijakan Camat Tanjung Raya dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Ibu Roza adalah sebagai berikut.

*"Nilai kebijakan pada Kecamatan Tanjung Raya berpedoman kepada kelestarian dan keserasian serta tata kelola pemerintahan yang baik."* (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 13.40 WIB)

Untuk kepuasan masyarakat dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau terhadap kinerja Camat Tanjung Raya menurut Ibu Roza yakni :

*"Kepuasan masyarakat dapat dilihat dari pendapat masyarakat pada saat dilakukan forum Kecamatan."* (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 13.30 WIB)

Selain nilai kebijakan oleh Camat Tanjung Raya, nilai-nilai kebijakan pemerintah dan Pemilik KJA dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan oleh Ibu Roza yakni :

*"Nilai kebijakan saya rasa adalah keberhasilan pengelolaan supaya kawasan danau ini menjadi lestari."* (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.35 WIB)

Kepuasan masyarakat dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau terhadap sinergi pemerintah dan Pemilik KJA menurut Pak Hendri yaitu :

*"Kepuasan masyarakat saya rasa sudah cukup puas, yang biasanya kepuasan ini disampaikan ketika sedang diskusi." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 09.20 WIB)*

Bentuk nilai-nilai kebijakan pemerintah dan Pemilik KJA dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Pak Hendri adalah sebagai berikut.

*"Nilai kebijakan berpedoman pada peraturan pemerintah." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 09.23 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa responsivitas evaluasi kegiatan dilihat dari nilai-nilai kebijakan dan kepuasan masyarakat. Responsivitas dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dapat dikatakan belum cukup responsif. Hal ini dikarenakan meskipun nilai kebijakan telah diterapkan pada masing-masing instansi yang terlibat hanya saja belum adanya survey kepuasan masyarakat akan kebijakan tersebut belum dapat menggambarkan bagaimana responsivitas sebagai bentuk evaluasi dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah perlu dilakukan penilaian terhadap kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil harus disertai dengan evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

## 5. Ketepatan

Ketepatan dapat dilihat dari hasil kebijakan dan manfaat kebijakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam. Hasil kebijakan pada Kecamatan Tanjung Raya Ibu Roza menyampaikan hal berikut

*"Hasil kebijakan dilihat dari pencapaian kinerja dimana Kecamatan Tanjung Raya belum mampu mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat secara seimbang dan kesinambungan." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 13.35 WIB)*

Bagaimana hasil sinergi pemerintah dan Pemilik KJA dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan oleh Pak Hendri sebagai pemilik KJA:

*"Hasil sinergi pemerintah dengan pemilik KJA adalah stop penambahan keramba jaring apung yang baru dan membina KJA yang sudah ada, padahal ini menjadi mata pencaharian kami." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 09.23 WIB)*

Masyarakat sekitar kawasan danau maninjau menyampaikan bagaimana hasil sinergi pemerintah dan Pemilik KJA dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Masyarakat sekitar Danau Maninjau Ibu Desmawati yakni :

*"Sudah dilakukan pengawasan namun ya masih seperti itu saja hingga saat ini."*

Selain hasil kebijakan kemudian manfaat hasil sinergi pemerintah dan Pemilik KJA dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Pemilik KJA oleh Bapak Joko adalah :

*"Manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat dan harusnya terus dilakukan sinergi antara pemerintah, pemilik KJA dan masyarakat." (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 09.40 WIB)*

Masyarakat sekitar Danau Maninjau menyampaikan bagaimana manfaat hasil sinergi pemerintah dan Pemilik KJA dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau oleh Bapak Joko yaitu :

*"Manfaatnya bagi pemilik KJA dapat menambah pendapatan masyarakat sehingga lebih sejahtera namun danau jadi tidak lestari lagi. (Wawancara: Selasa 11-Juli-2023, Pukul 10.10 WIB)*

Manfaat hasil kebijakan disampaikan Camat Tanjung Raya dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau sebagai berikut.

*"Manfaat hasil kebijakannya adalah kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan alam meskipun belum sepenuhnya tercapai." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 14.00 WIB)*

Hasil kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan pak Doni adalah :

*"Hasil kebijakan pada instansi dengan tetap melaksanakan kegiatan yang telah berjalan, kemudian melakukan upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja hingga melahirkan inovasi baru yang dapat mendukung jalannya kegiatan." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 10.50 WIB)*

Bagaimana manfaat hasil kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau berdasarkan wawancara dengan Pak Doni sebagai berikut.

*"Manfaat hasil kebijakan adalah tercapainya tujuan pemerintah khususnya tujuan pengelolaan kawasan danau secara lebih detail pengelolaan KJA." (Wawancara: Senin 10-Juli-2023, Pukul 10.55 WIB)*

Hasil kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan Pak Jafrizal yakni :

*"Hasil kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari capaian indikator kinerja terhadap pengelolaan kawasan danau maninjau." ."*  
(Wawancara: Senn 10-Juli-2023, Pukul 13.30 WIB)

Untuk manfaat hasil kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau disampaikan Pak Jafrizal yakni :

*"Manfaatnya dapat dilihat dengan kawasan yang terjaga dan lestari ekosistem nya." ."* (Wawancara: Senn 10-Juli-2023, Pukul 13.35 WIB)

Bagaimana hasil kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau menurut Pak Ade yakni :

*"Hasil kebijakan terhadap pengelolaan keramba jaring apung berupa pencapaian kinerja yitu mengkordinir pengawasan dan penindakan pelanggaran regulasi terkait pengelolaan danau." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.38 WIB)*

Selanjutnya manfaat hasil kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di danau maninjau berdasarkan wawancara dengan Pak Ade yakni :

*"Manfaat dari hasil kebijakan adalah terciptanya kawasan danau yang aman dan lestari." (Wawancara: Rabu 12-Juli-2023, Pukul 09.40 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ketepatan evaluasi kegiatan dilihat dari hasil kebijakan dan manfaat kebijakan. Ketepatan dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dikatakan belum tepat karena hasil kebijakan dan manfaat kebijakan belum dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu kebijakan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau straregi dari

berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Dalam penelitian ini belum dilihat kebijakan memiliki strategi yang cukup untuk menangani masalah keramba jaring apung.

### **C. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.**

Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Dalam evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa hal yang hambatan adalah yakni :

1. Kekayaan yang tersimpan di alam Maninjau dan danaunya membuat hubungan manusia dan alam semakin erat. Tanah yang subur, iklim yang menyenangkan, sumber makanan dan air yang berlimpah, serta banyak kekayaan lainnya. Kebutuhan akan sumber daya alam disini pada awalnya hanyalah alasan untuk bertahan hidup, namun perkembangan seiring berjalannya waktu membuat cara hidup terus berkembang dan membentuk banyak beragam alasan lainnya. Budaya masyarakat yang saat ini menjadikan danau sebagai industri budidaya ikan yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar, hal ini menjadi kendala dalam



penerapan pelaksanaan kebijakan pengendalian keramba jaring apung ramah lingkungan.

2. Zonasi sangat penting dalam pengambilan kebijakan di kawasan danau karena danau tidak hanya digunakan untuk mengembangkan budidaya ikan dalam sistem KJA tetapi juga digunakan untuk keperluan lain seperti pembangkit listrik tenaga air, pariwisata, perikanan, oleh karena itu Zonasi perlu diselesaikan dengan cepat sehingga agar hal ini tidak lagi menghambat Pemerintah dalam melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
3. Banyaknya Investor, Danau Maninjau tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat tetapi juga oleh masyarakat di luar Kabupaten Tanjung Raya. Banyaknya investor juga menjadi kendala dalam penerapan pengendalian keramba jaring apung.
4. Kurangnya pemahaman pemilik KJA terkait dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan keramba jaring apung yang kurang tepat terhadap kelestarian Danau Maninjau.
5. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan Pemilik KJA serta masyarakat dalam mengelola keramba jaring apung di wilayah Danau Maninjau. Dan
6. Kurangnya kepedulian pemilik KJA untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian Danau Maninjau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Camat Tanjung Raya, Satpol PP Kabupaten Agam dan juga Pemilik KJA serta masyarakat sekitar kawasan Danau Maninjau. Peran dari masing-masing pihak telah dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan dan Kebijakan daerah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan melihat efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan.

1. Efektivitas dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dikatakan belum efektif karena capaian kebijakannya belum mencapai target yang diharapkan meskipun kebijakannya telah memiliki tujuan yang jelas namun pada dasarnya Danau Maninjau merupakan salah satu bentuk mata pencaharian masyarakat sehingga sulit mengikuti aturan yang ditetapkan dan kebijakan

tersebut belum bisa dijalankan karena belum adanya peraturan zonasi dari pemerintah

2. Efisiensi dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dikatakan belum efisien karena hasil yang diinginkan belum sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang dalam peraturan daerahnya. Upaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan tersebut berupa upaya advokasi, sosialisasi, koordinasi dan pembentukan tim khusus.
3. Kecukupan dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dikatakan belum dikatakan cukup karena kegiatan yang dilakukan belum membantu memecahkan masalah seperti musyawarah, forum diskusi, koordinasi antara pemerintah dan lintas sektoral. Hasil dari pemecahan masalah tersebut belum menunjukkan tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi kegiatan.
4. Responsivitas dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dapat dikatakan belum cukup responsif. Hal ini dikarenakan meskipun nilai kebijakan telah diterapkan pada masing-masing instansi yang terlibat hanya saja belum adanya survey kepuasan masyarakat akan kebijakan tersebut belum dapat menggambarkan bagaimana responsivitas sebagai bentuk evaluasi dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam.

5. Ketepatan dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung di Danau Maninjau Kabupaten Agam dikatakan belum tepat karena hasil kebijakan dan manfaat kebijakan belum dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan harus mengurus zonasi secepatnya karena sangat penting untuk pelaksanaan Peraturan Daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan diskusi intens dengan pihak Provinsi yang terlibat. Diskusi juga melibatkan Wali Nagari Danau Maninjau yang kemudian akan disampaikan langsung kepada masyarakat.
2. Pemerintah khususnya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan keramba jaring apung perlu melakukan evaluasi dengan survey kepuasan masyarakat. Hal ini dapat menjadi dasar evaluasi dan perencanaan kegiatan sebagai upaya mengatasi masalah.
3. Pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta Dinas Lingkungan Hidup melakukan edukasi berupa penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala terkait kelestarian kawasan Danau Maninjau.

4. Pemerintah dan masyarakat serta Pemilik KJA bersinergi dalam melakukan pengawasan yang diwujudkan pada aksi nyata dalam periode tertentu sebagai bentuk evaluasi terhadap pengelolaan karamba jaring apung di Danau Maninjau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Andry,hendry. 2015. *Prilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru:Marpoyan Tujuh Publishing.
- Badrudin. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mana University Press.
- Hasibuan, Melayu. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hartanto Tri.2023. *Permasalahan didalam Pelestarian Kawasan Permukiman*. Jawa Tengah: CV Sernu Untung.
- Handoko, T Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.
- Hidayatullah Syafril,Alvianna Stella dkk.2023.*Metodelogi Penelitian Pariwisata*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: GP Press.
- Kamsir. (2014) *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1999:707).
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusmiyati. 2021. *Konsep Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Lataruva Eisha&Putra F Muhammad, (2022). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*.

Bandung:CV.Media Sains Indonesia.

Maksudi, Beddy.2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok,

PT Raja Grafindo Persada.

Meleong, J.L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Nazir, Moh, 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*.

Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurcholis, H (2007). *Teori dan praktik pemerintah dan otonomi daerah*.

Jakarta: PT Grasindo.

Ravyansah, Purba sukarman dkk. 2022. *Kebijakan Publik*. Sumatera barat:

PT Global Eksekutif Teknologi

Sarinah&Mardalena.2017. *Pengantar Manajemen*.Yogyakarta: Deepublish.

Setyawati Enny Corry.2021.*Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.

Sumatera Barat: CV Azka Pustaka

Siagan, Sondang P. 2014. *Filsafat administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Sinambella, L. P (2016), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi

Aksara

Shobaruddin, Muh Drs (2005). *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personal*.

Jakarta: Rineka Cipta

Sofyan Wahyudi & Sofyan B, DKK.2021. *Strategi Pemberdayaan Obyek Wisata*.

Jawa Timur: CV Amerta Media

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:

Rosdakarya.

Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*.

Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta

Sutrisno Edy. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana

Syafri, Wirman.2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Zulkifli&Yogia,Moris.2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Universitas

Islam Riau.

Zulkifli, (2005). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru.

UIR Press

Zulkifli, (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

Publishing.

Zulkifli. Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan*

*Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

## **B. Dokumen**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

### C. Jurnal

Junaidy, Sugiannor, Dely anhar dkk .2021. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kapuas.*

Hartuti Purnaweni.2014. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah.*

Agus Widodo, Mohammad Solekhan, Bambang Siswanto. 2022. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di kota Semarang.*

Herman, Lilis Suriani, Naya Farisha. 2021. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru.*

Herling A. Watania, Ellen Eva Poli, Erick Lobja. 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Danau Tondano Di Kabupaten Minahasa.*